



**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573



VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

NILAI-NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS DAN KEJUJURAN
3. AKUNTABILITAS
4. RESPONSIBILITAS
5. KETERBUKAAN
6. KETIDAKBERPIHAKAN
7. PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM

NILAI-NILAI DASAR ASN

BERAKHLAK, MERUPAKAN AKRONIM DARI

“BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF DAN KOLABORATIF”

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025



Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. atas prestasinya sebagai Satuan Kerja Terbaik III sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dalam Pelaksanaan Diversi Periode Januari sampai dengan Juli 2025.



Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. atas prestasinya sebagai Satuan Kerja Terbaik I dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau dengan kategori A (82,15) sangat baik.



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Pereviu I

UDUT W K NAPITUPULU, S.H., M.H.

Pereviu II

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2025 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029 yang telah memasuki tahun kelima.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Semoga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pekanbaru, 19 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,


ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 19 (Sembilan belas) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis I “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern” pada tahun 2025 sebesar 105%.
2. Capaian Sasaran Strategis II “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, pada tahun 2025 sebesar 105%.
3. Capaian Sasaran Strategis III “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” pada tahun 2025 sebesar 100%.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025 adalah sebesar 103% dinyatakan “Berhasil”, karena pada ketiga sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	108%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan	3%	3%	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			melalui mediasi			
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%	50%	106%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	100
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	100
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	100
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	
<i>Latar Belakang</i>	8
<i>Kedudukan Tugas dan Fungsi</i>	8
<i>Struktur Organisasi</i>	10
<i>Issu Strategis</i>	10
<i>Sistematika Penyajian</i>	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
<i>Rencana Strategis 2020-2024</i>	13
<i>Rencana Kinerja Tahun 2024</i>	19
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	
<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	23
<i>Realisasi Anggaran</i>	74
BAB IV PENUTUP	
<i>Kesimpulan</i>	79
<i>Saran</i>	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum, kepaniteraan PHI, kepaniteraan tipikor dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, ti dan pelaporan, sub bagian umum dan keuangan, dan sub bagian kepegawaian dan ortala.
7. Fungsi lainnya:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pekanbaru masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Permasalahan Internal

- a. Kekurangan sumber daya manusia, baik dibidang teknis maupun non teknis peradilan, karena ada beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun.
- b. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan.
- c. Anggaran untuk sarana dan prasarana Kantor masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja.
- d. Anggaran yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah diusulkan.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih adanya perilaku masyarakat para pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi Hakim.
- b. Masih adanya masyarakat yang tidak menghormati lembaga peradilan dan menjurus ke arah *Contemp of Court*.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang terdiri 3 (tiga) sub bab yaitu:

A. Rencana Strategis 2025-2029

- a. Visi
- b. Misi

- c. Tujuan
- d. Sasaran
- B. Rencana Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan capaian kinerja.

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnyaperadilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

2. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Utama

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai program, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

b. Kegiatan Pokok

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

I. Program: Dukungan manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama

Indikator Kegiatan: Layanan sarana dan prasarana, layanan dukungan manajemen internal, dan layanan manajemen kinerja internal

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

II. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan: Koordinasi, perkara hukum perorangan dan layanan bantuan hukum perorangan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

- Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025 – 2029

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

a. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	90%	90%	91%	92%	1. Program Dukungan Manajemen	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. 10 unit	18.751.453.000
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%			2. 2 Layanan	2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	300.000
	Persentase Putusan	53%		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	53%	55%	55%	55%	55%			3. 1 Dokumen	3. Layanan Manajemen Kinerja Internal	

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	72%	pengaju kepada para pihak							1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi 2. Perkara Hukum Perseorangan 3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 4. Perkara Hukum Perseorangan	1. 2 Kegiatan 2. 1.370 Perkara 3. 169 Orang 4. 3 Perkara	750.000
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	73%	73%	73%	74%	477.920.000					
	92%	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	93%	93%	93%	94%	44.000.000					
	45%	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	46%	46%	47%	48%	450.000					
	12%	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	13%	14%	15%						
	3%	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	4%	4%						
	47%	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%	48%	48%	49%	50%						
	95%	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang	95%	95%	96%	96%	96%						

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

				menggunakan e- Court										
		94%		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	94%	95%	96%	96%					
		95%		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	96%	96%	97%	97%					
		94%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	94%					
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	83	83					
		99		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	99	99	99					
		97		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	98	98	99					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		95		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	95	95	95					
		78		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
		3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	1. Program Dukungan Manajemen	1.Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 2.Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadlan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. 10 unit	18.751.453.000
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%			2.Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. 2 Layanan	17.523.834.000
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%			3.Layanan Manajemen Kinerja Internal	2. 1 Dokumen	300.000

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	750.000
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%				2. Perkara Hukum Perseorangan	477.920.000
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%				3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	44.000.000
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%				4. Perkara Hukum Perseorangan	450.000
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%					
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%					
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%					
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83					
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99					
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100					
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78					
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3					

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (SEBELUM REVISI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	55%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
5.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10%
6.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86%
8.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

9.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	Kepercayaan Publik			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, karena pada 3 (tiga) sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian 100%, yaitu: sebesar 103%. Capaian untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern sebesar 105%, Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebesar 105%, dan Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	13%	108%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	100%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%	50%	106%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang	95%	100%	105%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			menggunakan e- Court			
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I						105%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II						105%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	100
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	100
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	100
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III						100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025						103%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN I. TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mewujudkan peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%
	2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
	3. pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	108%
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	100%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	50%	106%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
Rata - Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				105%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas perkara.
2. Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 103 yang berbunyi bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi Evakip Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.sipp.pn-pekanbaru.go.id/>

Berdasarkan data pada aplikasi SIPP dan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip jumlah perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru yang putus tahun 2025 sebanyak 2.679 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.483 perkara dan perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu sebanyak 196 perkara.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Realisasi indikator ini sebesar 93%, melebihi target 89%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 104%.

Rincian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

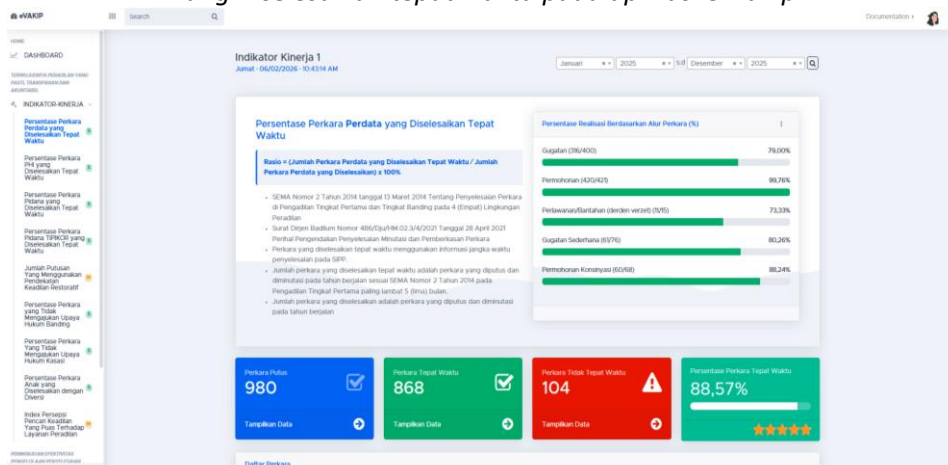
Tabel persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara yang diselesaikan tahun 2025	Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025	Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Januari	227	212	93,39
Februari	216	198	91,66
Maret	228	215	94,29
April	128	112	87,50
Mei	215	202	93,95
Juni	206	190	92,30
Juli	216	190	87,96
Agustus	227	212	93,39
September	244	230	94,26
Oktober	288	271	94,10
November	220	209	95
Desember	264	242	91,66%
Jumlah	2679	2483	93%

Pengukuran capaian kinerja perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor melalui aplikasi evakip.

1. Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

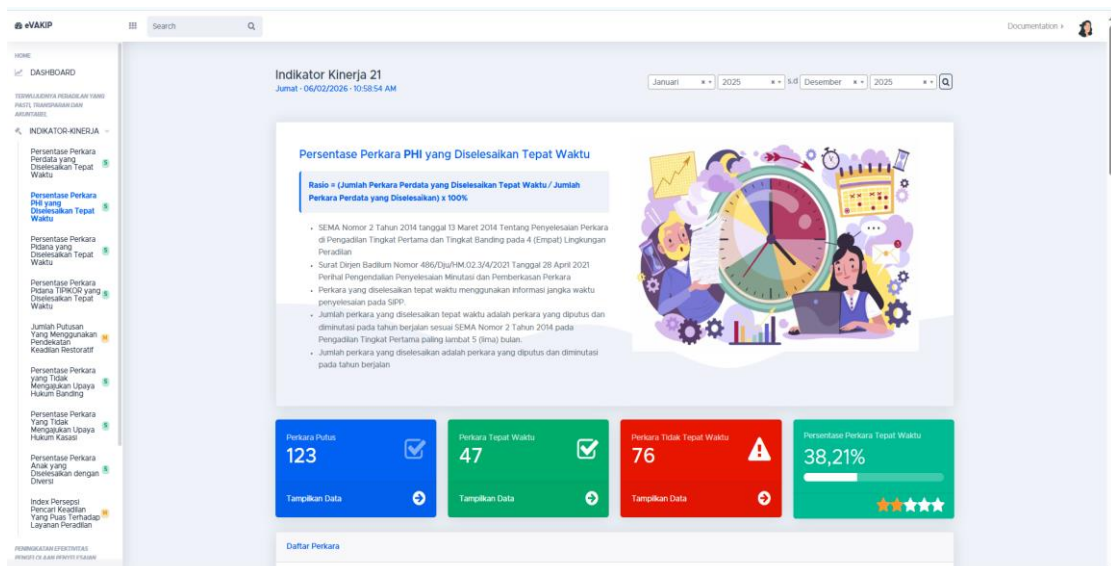
Rincian jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Th. 2025	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara Perdata Yang Putus Tepat Waktu
Januari	55	50	90,91%
Februari	68	62	91,18%
Maret	79	75	94,94%
April	51	42	82,35%
Mei	76	68	89,47%
Juni	62	51	82,26%
Juli	83	73	87,95%
Agustus	78	69	88,46%
September	92	81	88,04%
Oktober	132	118	89,39%
November	92	85	92,39%
Desember	112	94	83,93%
Jumlah	980	868	89%

2. Penyelesaian Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Indikator Persentase Perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

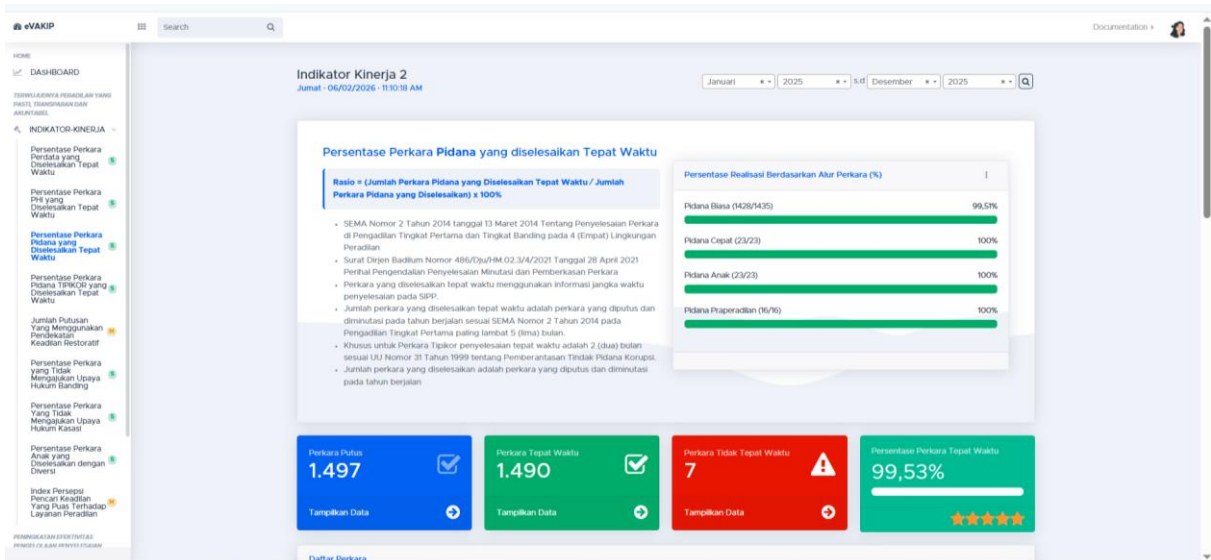
Rincian jumlah perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Perkara PHI Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara PHI yang Putus Th. 2025	Perkara PHI yang Putus Tepat Waktu Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara PHI Yang Putus Tepat Waktu
Januari	17	2	11,76%
Februari	12	0	0,00%
Maret	11	3	27,27%
April	7	1	14,29%
Mei	7	1	14,29%
Juni	4	1	25,00%
Juli	18	7	38,89%
Agustus	10	5	50,00%
September	5	2	40,00%
Oktober	13	10	76,92%
November	7	3	42,86%
Desember	14	10	71,43%
Jumlah	125	45	34,39%

3. Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

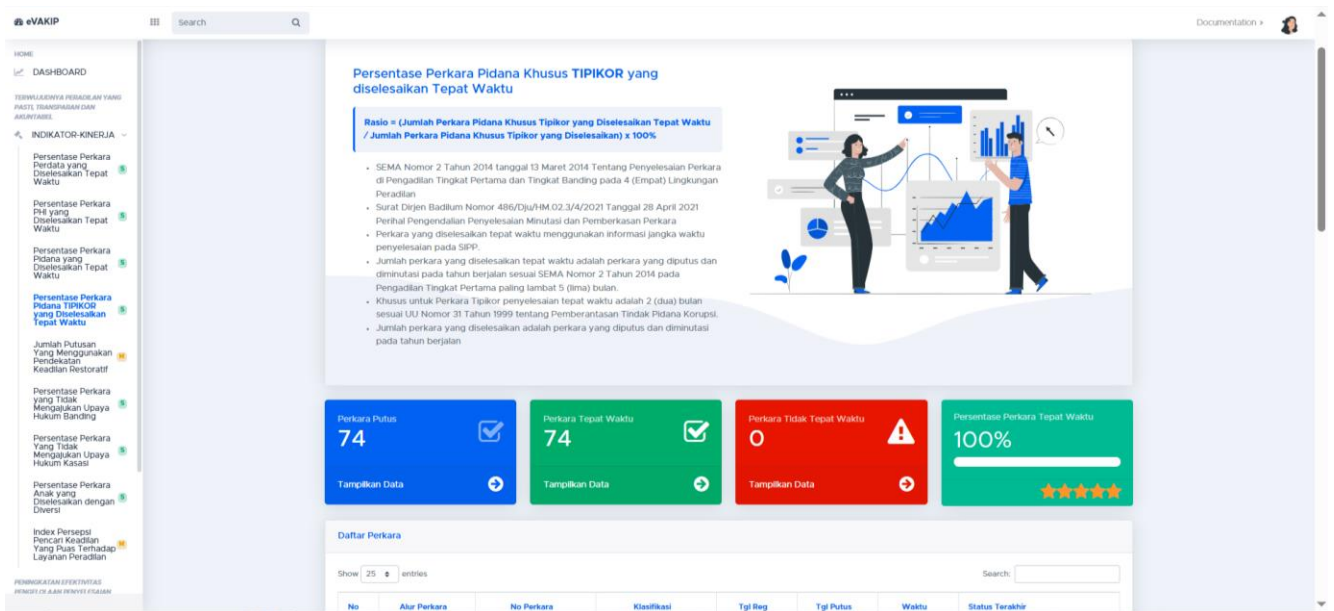
Rincian jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Th. 2025	Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu
Januari	114	113	99,12%
Februari	129	129	100%
Maret	132	132	100%
April	68	68	100%
Mei	147	147	100%
Juni	127	126	99,21%
Juli	117	114	97,44%
Agustus	136	134	97,53%
September	142	142	100%
Oktober	134	134	100%
November	121	121	100%
Desember	130	130	100%
Jumlah	1497	1490	99,53%

4. Penyelesaian Perkara Tipikor Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Indikator Persentase Perkara Tipikor Yang Diselesaikan tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Rincian jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Perkara Tipikor Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara Tipikor yang Putus Th. 2025	Perkara Tipikor yang Putus Tepat Waktu Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara Tipikor Yang Putus Tepat Waktu
Januari	6	6	100%
Februari	8	8	100%
Maret	7	7	100%
April	2	2	100%
Mei	6	6	100%
Juni	13	13	100%
Juli	3	3	100%
Agustus	4	4	100%
September	8	8	100%
Oktober	9	9	100%
November	0	0	0
Desember	8	8	100%
Jumlah	74	74	100%

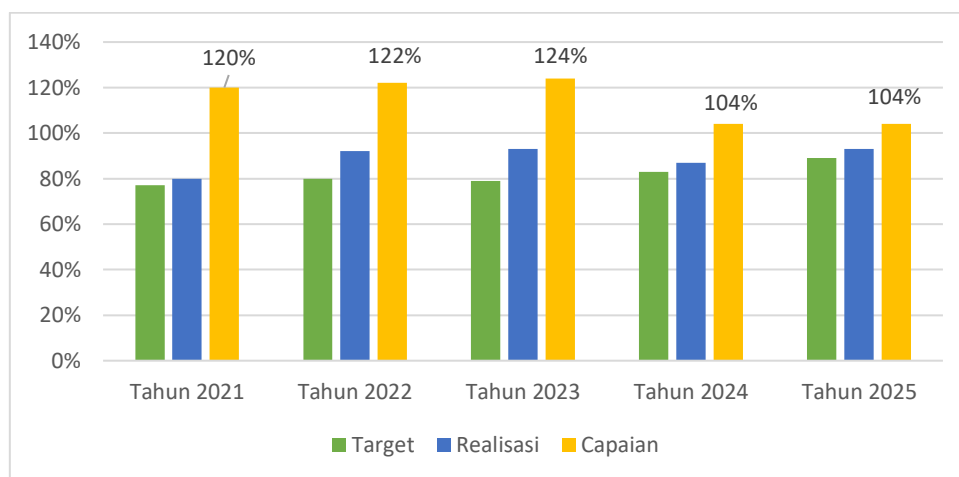
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sama sebesar 100%, dan realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sesuai Renstra Tahun 2020-2024, target 2025 sama dengan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024 dan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum tahun 2024, seperti dijelaskan pada tabel dan grafik berikut.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang selesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2025	2.679	2.483	89%	93%	104%
	2024	2.524	2.408	83%	87%	104%
	2023	2.317	2.277	79%	93%	124%
	2022	2.183	2.137	80%	92%	122%
	2021	2.339	2.090	77%	85%	111%

Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Th 2021 s.d 2025 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang selesaikan tepat waktu	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2025	2.679	2.483	89%	93%	104%
	2024	2.524	2.408	83%	87%	104%
	2023	2.317	2.277	79%	93%	124%
	2022	2.183	2.137	80%	92%	122%
	2021	2.339	2.090	77%	85%	111%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Realisasi indikator penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu dari tahun 2021 s.d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih diatas target jangka menengah sehingga capaiannya diatas 100%, Dengan demikian target jangka menengah sebesar 89% dapat dijadikan target Renstra kedepannya.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Penyampaian petikan dan salinan putusan ke para pihak tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahun 2025 jumlah Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2477 perkara, dan seluruh Salinan putusan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100% dan memperoleh capaian 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan apliasi pengukuran kinerja eVakip Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Rincian jumlah salinan putusan perkara yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak tahun 2025

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	jumlah perkara yang diputus	Realisasi Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Januari	175	175	100%
Februari	205	205	100%
Maret	218	218	100%
April	120	120	100%

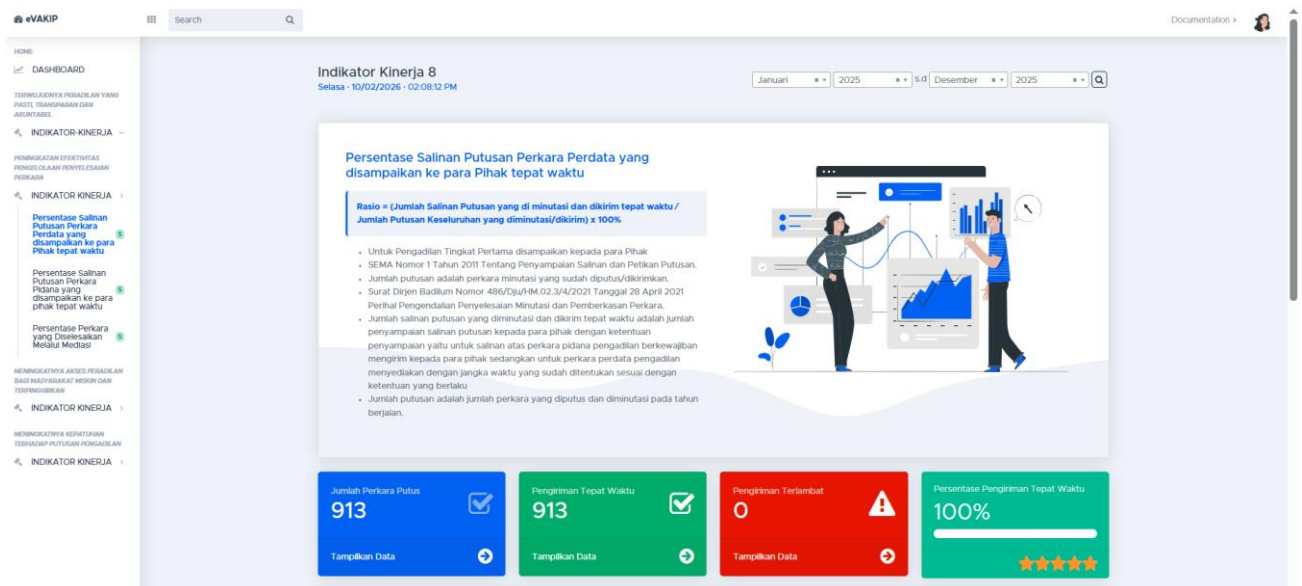
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Mei	229	229	100%
Juni	202	202	100%
Juli	203	203	100%
Agustus	218	218	100%
September	242	242	100%
Oktober	275	275	100%
November	213	213	100%
Desember	250	250	100%
Jumlah	2477	2477	100%

Pengukuran capaian kinerja perkara Perdata dan Pidana berdasarkan aplikasi evakip.

1. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Capaian Indikator Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan Perdata tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Rincian jumlah penyediaan/pengiriman salinan putusan perdata tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

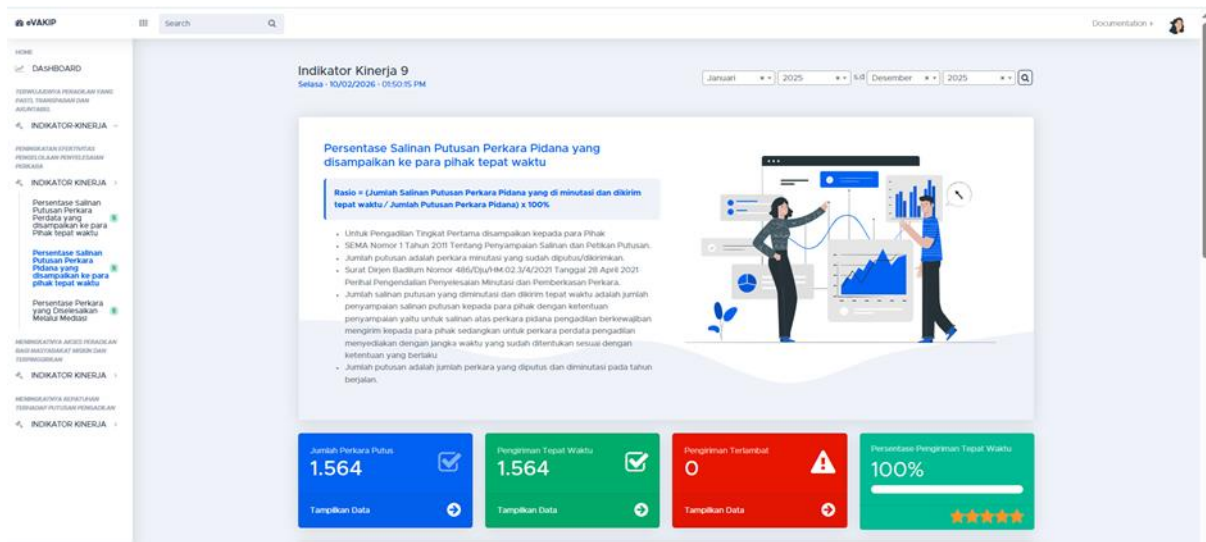
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak tahun 2025

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	jumlah perkara yang diputus	Realisasi Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perdata Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak
Januari	55	55	100%
Februari	68	68	100%
Maret	79	79	100%
April	51	51	100%
Mei	76	76	100%
Juni	62	62	100%
Juli	83	83	100%
Agustus	78	78	100%
September	92	92	100%
Oktober	132	132	100%
November	92	92	100%
Desember	112	112	100%
Jumlah	913	913	100%

2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Capaian Indikator Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan Perdata tepat waktu pada aplikasi e-Vakip



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Rincian jumlah penyediaan/pengiriman salinan putusan pidana tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak tahun 2025

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	jumlah perkara yang diputus	Realisasi Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak
Januari	120	120	100%
Februari	137	137	100%
Maret	139	139	100%
April	70	70	100%
Mei	153	153	100%
Juni	140	140	100%
Juli	120	120	100%
Agustus	140	140	100%
September	150	150	100%
Oktober	143	143	100%
November	121	121	100%
Desember	138	138	100%
Jumlah	1564	1564	100%

Realisasi Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada tahun 2025 adalah sama sebesar 100%, dan realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan pengaju tingkat pertama kepada para pihak selalu tepat waktu.

Faktor pendukung dalam keberhasilan tercapainya kinerja pada indikator pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para adalah :

1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan”

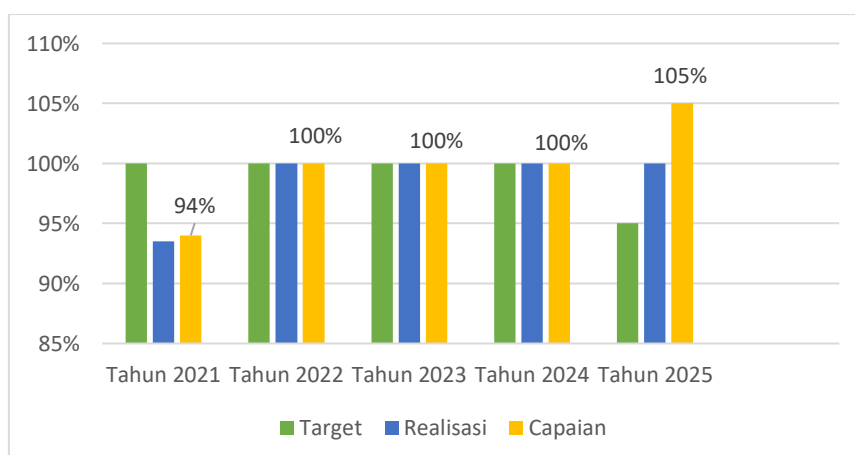
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

- Implementasi “Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara”
- Implementasi SOP Keganiteraan yang dikeluarkan Badilum melalui “SK No.934/DJU/SK/OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian Keganiteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pengiriman salinan putusan
- Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.

Tabel Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang		jumlah perkara yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
		Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu					
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	2477		2477	95%	100%	105%
	2024	2.511		2.511	100%	100%	100%
	2023	2317		2317	100%	100%	100%
	2022	2183		2183	100%	100%	100%
	2021	2339		2339	100%	100%	100%

Grafik Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 s.d 2025



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Dibandingkan Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu		jumlah perkara yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
					Jangka Menengah		
Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	2477	2477	2477	95%	100%	105%
	2024	2.511	2.511	2.511	100%	100%	117%
	2023	2317	2317	2317	100%	100%	117%
	2022	2183	2183	2183	100%	100%	117%
	2021	2339	2339	2339	100%	100%	117%

Realisasi indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu dari tahun 2021 s.d tahun 2025 telah jauh melewati target jangka menengah. Selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan indikator persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu ini ditetapkan target jangka menengah sebesar 95%.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN ATAU AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Rincian pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Pengiriman Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak th 2025

Bulan	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	realisasi persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Januari	29	19	65,52%
Februari	30	28	93,33%
Maret	33	3	9,09%
April	29	15	51,72%
Mei	35	15	42,86%
Juni	50	24	48,00%
Juli	44	23	52,27%
Agustus	42	24	57,14%
September	57	31	54,39%
Oktober	62	44	70,97%
November	39	20	51,28%
Desember	39	27	69,23%
Jumlah	489	273	55,83%

Pada tahun 2025 jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 489 perkara sedangkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 273 perkara. Sehingga realisasi indikator ini adalah 56%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Berikut tabel pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

6. Perkara Perdata

Bulan	Jumlah Petikan/Amar Putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju			Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan tingkat banding kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	5	-	-	2	-	-
Februari	4	-	-	1	-	-
Maret	5	8	1	-	-	-
April	4	5	1	1	-	-
Mei	7	1	-	2	-	-
Juni	7	4	-	-	-	-
Juli	8	3	1	5	-	-
Agustus	6	4	1	6	4	-
September	12	2	1	10	2	-
Oktober	8	6	3	8	1	-
November	12	3	-	8	1	-
Desember	7	6	-	5	-	-
JUMLAH	85	42	8	48	8	0

7. Perkara pidana

Bulan	Jumlah Petikan/Amar Putusan Banding Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju			Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan tingkat Banding Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	9	8	2	7	1	9
Februari	5	3	13	12	12	3
Maret	5	3	8	2	1	0
April	4	3	8	3	8	3
Mei	6	8	10	6	3	4
Juni	10	5	8	8	0	16
Juli	7	5	9	11	4	3
Agustus	7	3	12	7	5	0
September	7	7	11	8	4	6

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Oktober	6	7	18	6	9	20
November	4	7	11	3	3	4
Desember	8	5	2	6	5	5
JUMLAH	78	64	112	79	55	73

8. Perkara PHI

Bulan	Jumlah Petikan/Amar Putusan Kasasi yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan tingkat Kasasi yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
	Kasasi	Kasasi
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	1	0
April	2	0
Mei	1	0
Juni	9	0
Juli	10	0
Agustus	6	0
September	15	0
Oktober	14	0
November	1	0
Desember	5	0
JUMLAH	64	0

9. Perkara Tipikor

Bulan	Jumlah Petikan/Amar Putusan Banding Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju			Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan tingkat Banding Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	-	5	-	-	-	-
Februari	-	4	1	-	-	-
Maret	-	1	1	-	-	-
April	-	2	-	-	-	-
Mei	-	2	-	-	-	-

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Juni	-	3	4	-	-	-
Juli	-	-	1	-	-	-
Agustus	2	1	-	2	-	-
September	1	1	-	1	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	1	-	-	1	-	-
Desember	6	-	-	6	-	-
JUMLAH	10	19	7	10	0	0

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan atau Amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK Secara tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para pihak	2025	489	273	53%	56%	105%

Kendala-kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang tidak tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, yaitu:

- Penyampaian surat tercatat pos yang disampaikan ke para pihak lama diterima, tracking terhadap pemanggilan pemberitahuan belum memenuhi ketentuan dan berita acara pos surat tercatat lama diterima Kembali oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 4

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Indikator kinerja "Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak" adalah

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Rincian pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak th 2025

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Realisasi Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan Pk Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Januari	22	17	77,27%
Februari	26	27	103,85%
Maret	18	3	16,67%
April	17	14	82,35%
Mei	25	13	52%
Juni	30	24	80%
Juli	21	18	85,71%
Agustus	24	14	58,33%
September	26	19	73,08%
Oktober	31	35	112,9%
November	23	11	47,83%
Desember	21	22	104,76%
Jumlah	284	217	76%

Pada tahun 2025 jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 489 perkara sedangkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 273 perkara. Sehingga realisasi indikator ini adalah 56%.

Berikut tabel pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

1. Perkara Pidana

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan Pengaju			Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	9	8	2	7	1	9
Februari	5	3	13	12	12	3
Maret	5	3	8	2	1	0
April	4	3	8	3	8	3
Mei	6	8	10	6	3	4
Juni	10	5	8	8	0	16
Juli	7	5	9	11	4	3
Agustus	7	3	12	7	5	0
September	7	7	11	8	4	6
Oktober	6	7	18	6	9	20
November	4	7	11	3	3	4
Desember	8	5	2	6	5	5
JUMLAH	78	64	112	79	55	73

2. Perkara Tipikor

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan Pengaju			Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	-	-	3	-	-	-
Februari	-	1	4	-	-	-
Maret	-	1	1	-	-	-
April	-	-	2	-	-	-
Mei	-	-	1	-	-	-
Juni	-	4	3	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	2	-	-	2	-	-

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

September	1	-	-	1	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	1	-	-	1	-	-
Desember	6	-	-	6	-	-
JUMLAH	10	6	14	10	0	0

Indikator Kinerja	Tahun	Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Salinan putusan Perkara pidana tingkat banding, Kasasi dan PK Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para pihak	2025	284	217	72%	76%	105%

Kendala-kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang tidak tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, yaitu:

- Penyampaian surat tercatat pos yang disampaikan ke para pihak lama diterima dan berita acara pos surat tercatat lama diterima Kembali oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 5

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan” adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Direktori Putusan adalah Sistem Informasi yang berbasis Web untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan Seluruh Putusan Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding di Seluruh Indonesia. Jumlah Putusan Pengadilan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Negeri Pekanbaru yang diunggah Pada Direktori Putusan ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Berdasarkan data pada aplikasi SIPP jumlah putusan yang telah diminutasi tahun 2025 sebanyak 2.644 perkara dan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 2.600 perkara. Realisasi indikator ini sebesar 98%, melebihi target 92%, sehingga capaian Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan mencapai 106%.

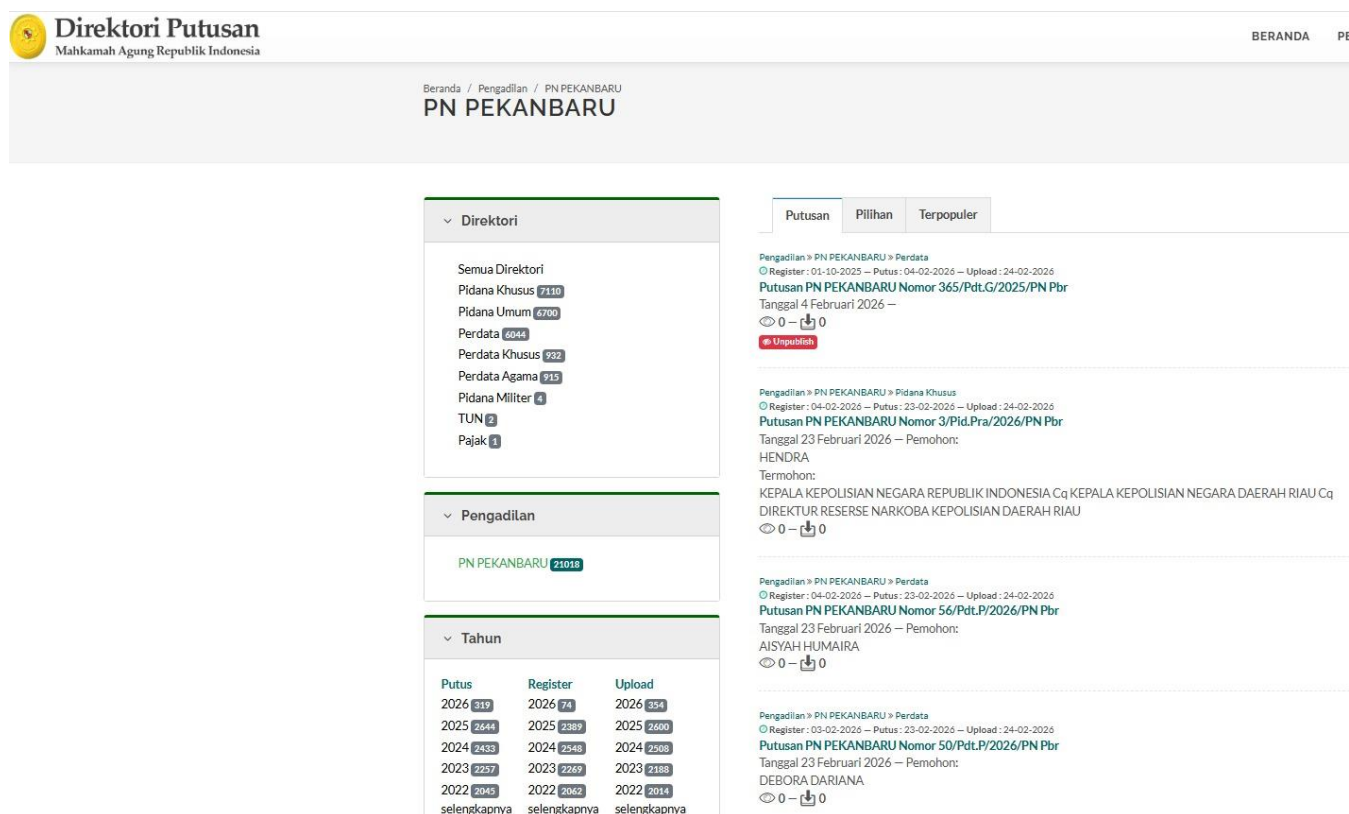
Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah Pada Direktori Putusan

Bulan	Jumlah putusan yang telah diminutasi tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Realisasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Januari	192	192	100%
Februari	216	213	98,61%
Maret	228	228	100%
April	128	128	100%
Mei	215	212	98,6%
Juni	206	205	99,51%
Juli	216	216	100%
Agustus	227	223	98,24
September	244	241	100%
Oktober	288	262	90,97%
November	220	216	98,18%
Desember	264	264	100%
Jumlah	2644	2600	98,33%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Berikut data putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung RI :



Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beranda / Pengadilan / PN PEKANBARU

PN PEKANBARU

Direktori

- Semua Direktori
- Pidana Khusus 7110
- Pidana Umum 6700
- Perdata 6044
- Perdata Khusus 932
- Perdata Agama 915
- Pidana Militer 4
- TUN 2
- Pajak 1

Pengadilan

- PN PEKANBARU 21018

Tahun

Putus	Register	Upload
2026 319	2026 74	2026 354
2025 2644	2025 2389	2025 2600
2024 2433	2024 2548	2024 2508
2023 2257	2023 2269	2023 2188
2022 2045	2022 2062	2022 2014
selengkapnya	selengkapnya	selengkapnya

Putusan | Pilihan | Terpopuler

Pengadilan > PN PEKANBARU > Perdata
Register: 01-10-2025 – Putus: 04-02-2026 – Upload: 24-02-2026
Putusan PN PEKANBARU Nomor 365/Pdt.G/2025/PN Pbr
Tanggal 4 Februari 2026 –
0 – 0
Unpublikasi

Pengadilan > PN PEKANBARU > Pidana Khusus
Register: 04-02-2026 – Putus: 23-02-2026 – Upload: 24-02-2026
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2026 – Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH RIAU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
0 – 0

Pengadilan > PN PEKANBARU > Perdata
Register: 04-02-2026 – Putus: 23-02-2026 – Upload: 24-02-2026
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pdt.P/2026/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2026 – Pemohon:
AISYAH HUMAIRA
0 – 0

Pengadilan > PN PEKANBARU > Perdata
Register: 03-02-2026 – Putus: 23-02-2026 – Upload: 24-02-2026
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pdt.P/2026/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2026 – Pemohon:
DEBORA DARIANA
0 – 0

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 6

PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Berdasarkan data eksekusi pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 79 perkara sedangkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan sebanyak 38 perkara sehingga realisasi indikator ini sebesar 48% dan capaiannya sebesar 106%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Realisasi Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan
Januari	6	3	50%
Februari	7	0	0%
Maret	3	1	33,33%
April	2	1	50%
Mei	15	13	86,67%
Juni	21	15	71,43%
Juli	7	4	57,14%
Agustus	7	1	14,29%
September	4	0	0%
Oktober	2	0	0%
November	2	0	0%
Desember	3	0	0%
Jumlah	79	38	48%

Kendala yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan eksekusi perkara perdata tahun 2025, yaitu:

1. Ada sebagian pemohon yang menyatakan Upaya hukum.
2. Pihak termohon mengajukan perlawanan terhadap sita.
3. Kesiapan tentang pengamanan.

Kendala yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan eksekusi perkara PHI tahun 2025, yaitu:

1. Eksekusi tidak sampai tuntas karena si pemohon sulit untuk menemukan asset milik termohon.
2. Aset termohon eksekusi bukan atas nama perusahaan tetapi atas nama pribadi (direktur).
3. Pada tahap pelaksanaan eksekusi lelang si pemohon tidak ada biaya untuk membayar appraisal (jasa penilaian publik).

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

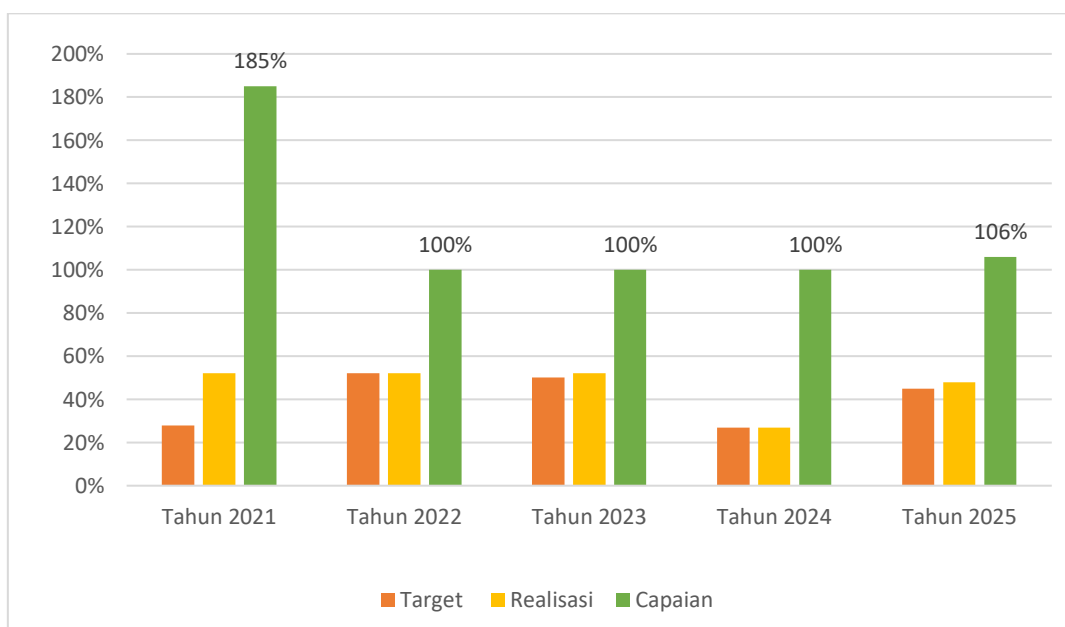
Realisasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Perdata pada tahun 2025 sebesar 48% yang nilai realisasinya lebih tinggi dari tahun 2024 yakni 27%. Capaian tahun 2025 sebesar 106% lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Persentase capaian penyelesaian permohonan eksekusi putusan Perdata sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 diatas 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menyelesaikan permohonan eksekusi putusan Perdata.

Tabel Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	2025	79	38	45%	48%	106%
	2024	44	12	27%	27%	100%
	2023	62	32	50%	52%	104%
	2022	68	36	52%	52%	100%
	2021	104	54	28%	52%	185%

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata tahun 2021 s.d. 2025



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase	2025	79	38	45%	48%	106%
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	2024	44	12	27%	27%	100%
	2023	62	32	50%	52%	104%
	2022	68	36	52%	52%	100%
	2021	104	54	28%	52%	185%

Realisasi indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dari tahun 2021 s.d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih diatas target jangka menengah sehingga capaiannya diatas 100%. Dengan demikian target jangka menengah sebesar 45% dapat dijadikan target Renstra kedepannya.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 7

PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan.

Indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan.

Penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:

- a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. Terdapat relasi kuasa;
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa

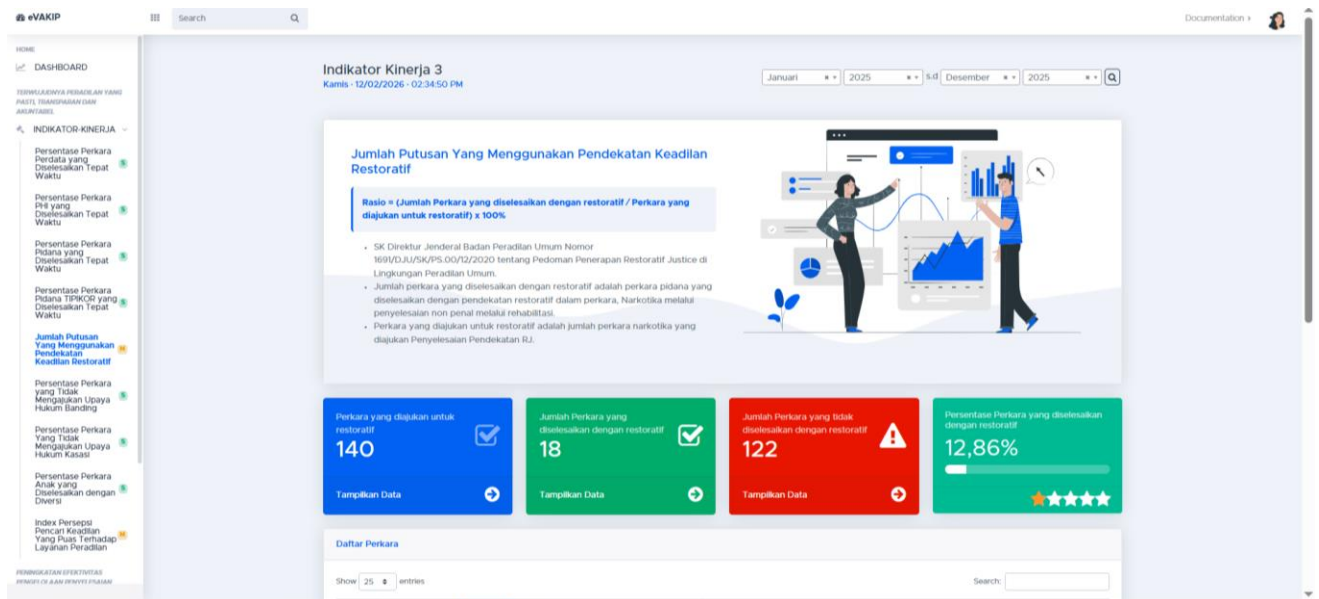
Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restorative:

- a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.
- b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
- c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan data pada aplikasi Evakip, jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative sebanyak 140 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 18 perkara sehingga realisasinya sebesar 13% dengan capaian sebesar 108%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Capaian Indikator Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative pada aplikasi Evakip



Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative	Realisasi Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative
Januari	0	0	0%
Februari	0	0	0%
Maret	0	0	0%
April	0	0	0%
Mei	0	0	0%
Juni	0	0	0%
Juli	2	2	100%
Agustus	18	1	5,56%
September	28	0	0%
Oktober	40	3	7,5%
November	21	6	28,57%
Desember	31	6	19,35%
Jumlah	140	18	13%

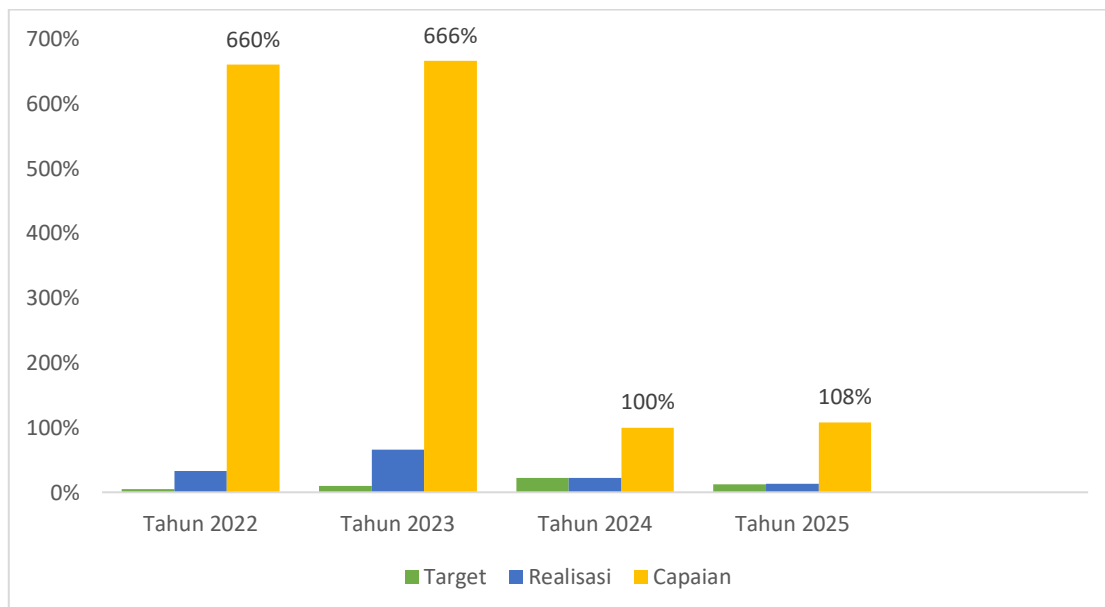
Realisasi kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative pada tahun 2025 sebesar 13% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

2024 yakni 22%. Capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Capaian ini mengalami Peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan 2024.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Sesuai data di tabel, sejak tahun 2022 sampai dengan 2025 capaian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Pekanbaru 100% hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Grafik persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
Tahun 2022 s.d 2025



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang diajukan untuk <i>restorative</i>	jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i>	Target	Realisasi	Capaian
persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2025	140	18	12%	13%	108%
	2024	9	2	22%	22%	100%
	2023	6	4	10%	66%	666%
	2022	6	2	5%	33%	660%

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative
Dibandingkan Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang diajukan untuk <i>restorative</i>	jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i>	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2025	140	18	12%	13%	108%
	2024	9	2	22%	22%	100%
	2023	6	4	65%	66%	78%
	2022	6	2	30%	33%	39%

Realisasi indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dari tahun 2021 s.d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih diatas target jangka menengah sehingga capaiannya diatas 100%. Dengan demikian target jangka menengah sebesar 12% dapat dijadikan target Renstra kedepannya.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 8

PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

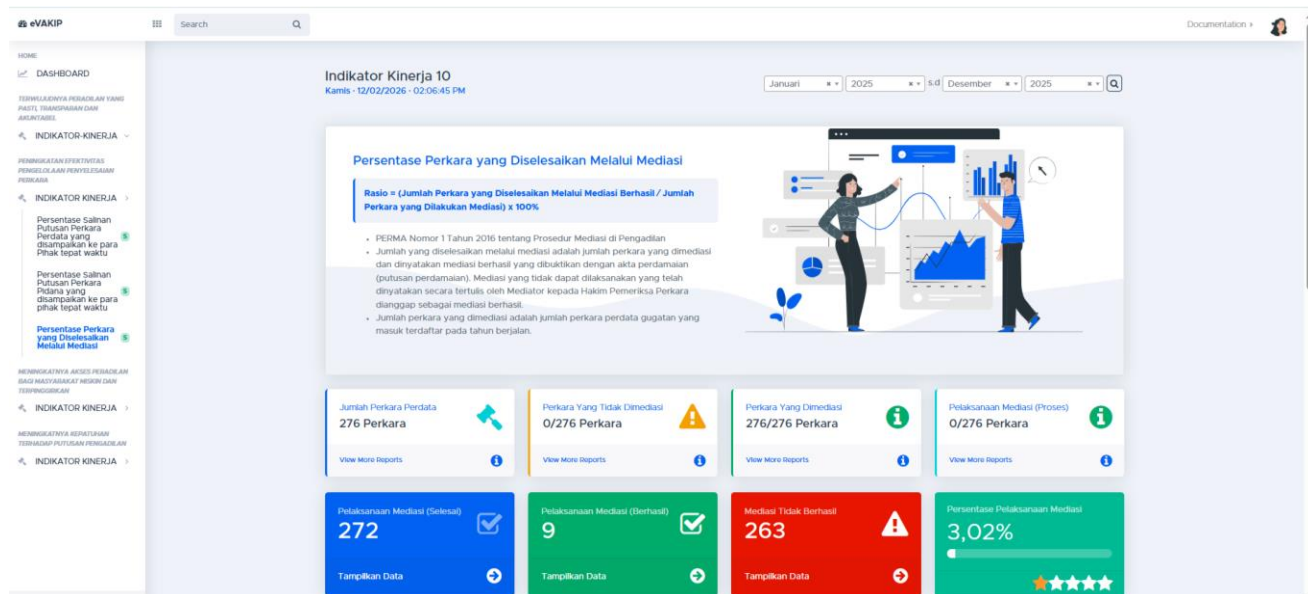
Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator NonHakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan data pada aplikasi Evakip, Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 272 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 9 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 263 perkara sehingga realisasinya sebesar 3% dan capaiannya 100%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan Hakim Mediasi.

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Capaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada aplikasi Evakip



Tabel Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2025

Bulan	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Th. 2025	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Januari	17	0	0%
Februari	26	2	7,69%
Maret	20	0	0%
April	15	0	0%
Mei	19	1	5,26%
Juni	24	1	4,17%
Juli	27	0	0%
Agustus	26	1	3.85%
September	19	0	0%
Oktober	37	2	5,41%
November	25	1	4%
Desember	17	1	5,88%
Jumlah	272	9	3%

Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 sebesar 3% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2024 yakni 8%. Capaian tahun 2024 sebesar

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

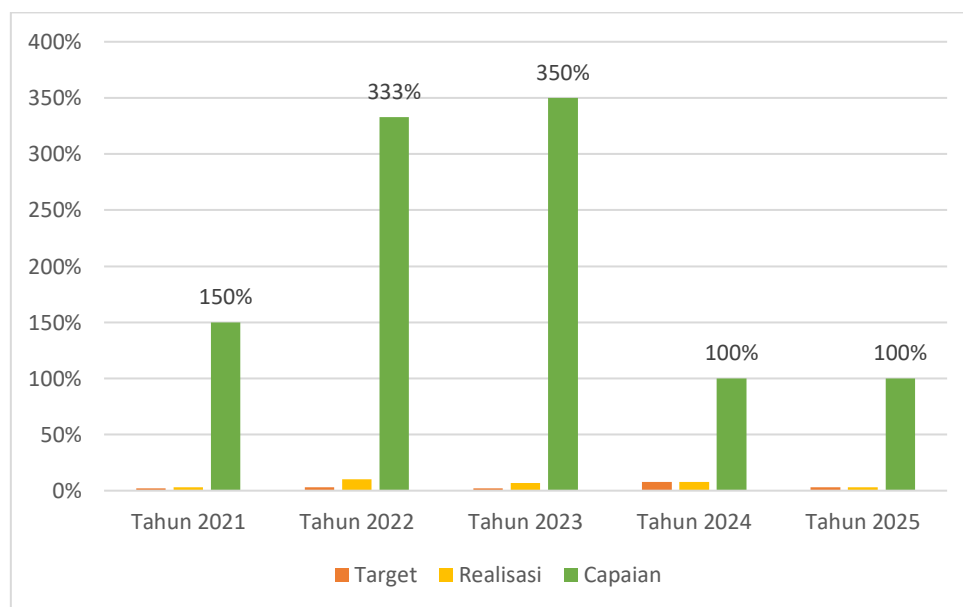
100% sama dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%, karena target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan 2024.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan baik sengketa maupun permasalahan rumah tangga.
2. Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sesuai data di tabel capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 konsisten di angka 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penyelesaian perkara melalui mediasi berhasil.

Grafik Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2021 s.d 2025



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang	jumlah perkara yang berhasil	Target	Realisasi	Capaian
		wajib dilakukan mediasi Th. 2025	diselesaikan melalui mediasi Th. 2025			
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2025	272	9	3%	3%	100%
	2024	219	18	8%	8%	100%
	2023	195	14	2%	7%	350%
	2022	235	24	3%	10%	333%
	2021	385	12	2%	3%	150%

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Dibandingkan Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang	jumlah perkara yang	Target	Realisasi	Capaian
		wajib dilakukan mediasi Th. 2025	berhasil diselesaikan melalui mediasi Th. 2025	Jangka Menengah		
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2025	272	9	3%	3%	100%
	2024	219	18	8%	8%	100%
	2023	195	14	2%	7%	350%
	2022	235	24	3%	10%	333%
	2021	385	12	2%	3%	150%

Realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2021 s.d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih diatas target jangka menengah sehingga capaiannya diatas 100%. Dengan demikian target jangka menengah sebesar 3% dapat dijadikan target Renstra kedepannya.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 9

PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

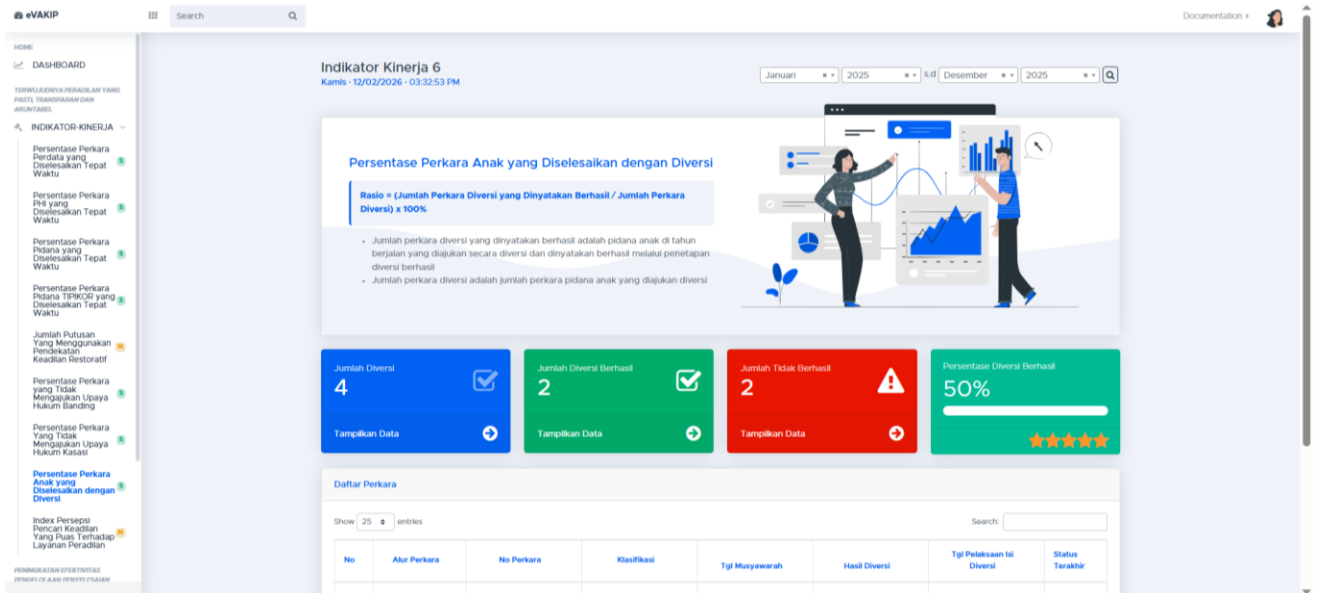
Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan data pada aplikasi Evakip, jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 sebanyak 4 perkara dan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil sebanyak 2 perkara.

Perkara pidana anak yang tidak berhasil melalui penetapan diversi disebabkan karena:

1. Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara pada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.
2. Karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah diversi yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Capaian Indikator Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi pada aplikasi Evakip



Tabel Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi tahun 2025

Bulan	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Realisasi Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
Januari	0	0	0%
Februari	1	1	100%
Maret	0	0	0%
April	1	0	0%
Mei	1	0	0%
Juni	0	0	0%
Juli	0	0	0%
Agustus	0	0	0%
September	0	0	0%
Oktober	0	0	0%
November	1	1	100%
Desember	0	0	0%
Jumlah	4	2	50%

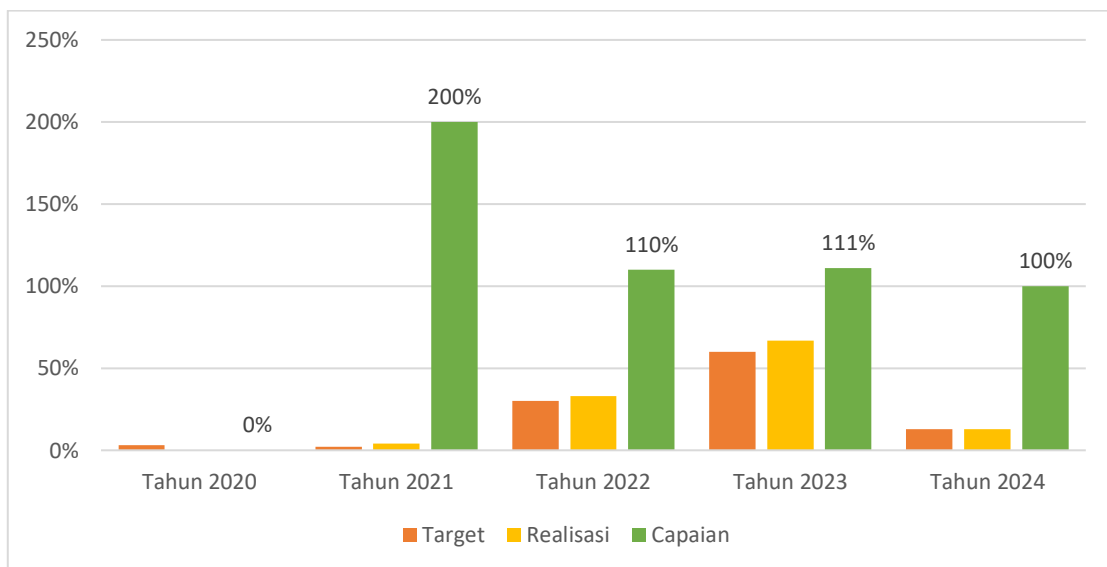
Realisasi kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2025 sebesar 50% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 13%. Capaian pada tahun 2025 sebesar 106% lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

dikarenakan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah diversi yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Sesuai data di tabel, sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru diatas 100% hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

Grafik Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
Tahun 2021 s.d 2025



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Tabel Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Target	Realisasi	Capaian
persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2025	4	2	47%	50%	106%
	2024	8	1	13%	13%	100%
	2023	6	4	60%	66,67%	111%
	2022	6	2	30%	33%	110%
	2021	47	2	2%	4%	200%

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi
Dibandingkan Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2025	4	2	47%	50%	106%
	2024	8	1	13%	13%	100%
	2023	6	4	60%	66,67%	111%
	2022	6	2	30%	33%	110%
	2021	47	2	2%	4%	200%

Realisasi indikator Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi dari tahun 2021 s.d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih diatas target jangka menengah sehingga capaiannya diatas 100%. Dengan demikian target jangka menengah sebesar 47% dapat dijadikan target Renstra kedepannya.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 10

PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E-COURT

Indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Ecourt adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online (*e-Skum*), pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online.

Jumlah jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 sebanyak 1376 perkara dan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court sebanyak 1376 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa semua perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diajukan menggunakan E-Court sehingga realisasinya 100%.

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court pada tahun 2025.

Tabel Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Melalui E-Court	Realisasi Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court
Januari	76	76	100%
Februari	101	101	100%
Maret	117	117	100%
April	77	77	100%
Mei	89	89	100%
Juni	147	147	100%
Juli	155	155	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Agustus	120	120	100%
September	133	133	100%
Oktober	135	135	100%
November	105	105	100%
Desember	121	121	100%
Jumlah	1376	1376	100%

Sesuai data tabel diatas realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diajukan menggunakan E-Court.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 11

PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPALKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan izin atau persetujuan penggeledahan
3. Pengajuan penetapan izin penyitaan
4. Pengajuan perpanjangan penahanan
5. Penangguhan penahanan
6. Permohonan pembantaran penahanan
7. Permohonan penetapan diversi
8. Permohonan pinjam pakai barang bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan
14. Cek Status Pengajuan Izin Besuk Tahanan Online
15. Cek Status Pengajuan Izin Keluar Tahanan Online

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 adalah sebanyak 1546 perkara dan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebanyak 1523 perkara, sedangkan 23 perkara dilimpahkan secara manual yakni perkara pidana cepat (tipiring).

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025.

Tabel Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Realisasi Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)
Januari	127	123	96,85%
Februari	108	103	95,37%
Maret	176	175	99,43%
April	76	76	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Mei	121	119	98,35%
Juni	115	113	98,26%
Juli	175	174	99,43%
Agustus	123	120	97,56%
September	128	127	99,22%
Oktober	141	138	97,87%
November	111	110	99,1%
Desember	145	145	100%
Jumlah	1546	1523	99%

Sesuai data tabel diatas realisasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 99%.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 12

PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan izin atau persetujuan penggeledahan
3. Pengajuan penetapan izin penyitaan
4. Pengajuan perpanjangan penahanan
5. Penangguhan penahanan
6. Permohonan pembantaran penahanan
7. Permohonan penetapan diversi
8. Permohonan pinjam pakai barang bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan
14. Cek Status Pengajuan Izin Besuk Tahanan Online
15. Cek Status Pengajuan Izin Keluar Tahanan Online

Jumlah layanan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 sebanyak 4.388 perkara dan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) sebanyak 4.388 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa semua layanan perkara pidana diajukan secara elektronik (e-berpadu).

Tabel Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Bulan	jumlah layanan perkara pidana	jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik	Realisasi Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)
Januari	280	280	100%
Februari	377	377	100%
Maret	471	471	100%
April	276	276	100%
Mei	316	316	100%
Juni	441	441	100%
Juli	438	438	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Agustus	376	376	100%
September	410	410	100%
Oktober	397	397	100%
November	302	302	100%
Desember	304	304	100%
Jumlah	4388	4388	100%

Sesuai data tabel diatas realisasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah diangka 100%.

SASARAN II. MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				105%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2025.

SASARAN II - INDIKATOR KINERJA 1

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan. Berdasarkan Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 99%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 94% sehingga memperoleh capaian sebesar 105%.

Gambar nilai index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Pada aplikasi survey (aplikasi Si Super)



Tabel dibawah ini menunjukkan data peningkatan capaian kinerja indeks responden peradilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Index survey kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025 sebesar 99,07%, sama dengan tahun 2024 yang hanya mencapai 99%. Kondisi ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu konsisten.

TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2021	1	Persyaratan	93,75	Sangat baik	93,75	91	103,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	92,50	Sangat baik	92,50	91	101,6%
	3	Waktu Penyelesaian	88,00	Sangat baik	88,00	91	96,7%
	4	Biaya/Tarif	95,00	Sangat Baik	95,00	91	104,4%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89,25	Sangat baik	89,25	91	98,1%
	6	Kompetensi Pelaksana	92,50	Sangat baik	92,50	91	101,6%
	7	Perilaku Pelaksana	95,75	Sangat baik	95,75	91	105,2%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	93,00	Sangat baik	93,00	91	102,2%
	9	Sarana dan Prasarana	98,75	Sangat baik	98,75	91	108,5%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021:					93	91
Th. 2022	1	Persyaratan	92,95	Sangat baik	92,95	92	101,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	89,80	Sangat baik	89,80	92	97,6%
	3	Waktu Penyelesaian	89,08	Sangat baik	89,08	92	96,8%
	4	Biaya/Tarif	88,38	Sangat Baik	88,38	92	96,1%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,00	Sangat baik	90,00	92	97,8%
	6	Kompetensi Pelaksana	91,55	Sangat baik	91,55	92	99,5%
	7	Perilaku Pelaksana	92,60	Sangat baik	92,60	92	100,7%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	94,38	Sangat baik	94,38	92	102,6%
	9	Sarana dan Prasarana	99,65	Sangat baik	99,65	92	108,3%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022:					92	92
Th. 2023	1	Persyaratan	92,50	Sangat baik	92,50	93	99,5%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,75	Sangat baik	93,75	93	100,8%
	3	Waktu Penyelesaian	90,00	Sangat baik	90,00	93	96,8%
	4	Biaya/Tarif	92,00	Sangat Baik	92,00	93	98,9%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,25	Sangat baik	92,25	93	99,2%
	6	Kompetensi Pelaksana	93,25	Sangat baik	93,25	93	100,3%
	7	Perilaku Pelaksana	95,00	Sangat baik	95,00	93	102,2%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	95,00	Sangat baik	95,00	93	102,2%
	9	Sarana dan Prasarana	96,25	Sangat baik	96,25	93	103,5%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2023:					93	93
Th. 2024	1	Persyaratan	99,30	Sangat baik	99,30	94	105,6%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,93	Sangat baik	97,93	94	104,2%
	3	Waktu Penyelesaian	99,30	Sangat baik	99,30	94	105,6%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	4	Biaya/Tarif	99,30	Sangat Baik	99,30	94	105,6%	
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	99,30	Sangat baik	99,30	94	105,6%	
	6	Kompetensi Pelaksana	100,00	Sangat baik	100,00	94	106,4%	
	7	Perilaku Pelaksana	97,93	Sangat baik	97,93	94	104,2%	
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	98,60	Sangat baik	98,60	94	104,9%	
	9	Sarana dan Prasarana	100,00	Sangat baik	100,00	94	106,4%	
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2024:					99	94	105%
	Th. 2025	1	Persyaratan	99,30	Sangat baik	99	94	105,6%
		2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,93	Sangat baik	99	94	104,2%
3		Waktu Penyelesaian	99,30	Sangat baik	99	94	105,6%	
4		Biaya/Tarif	99,30	Sangat Baik	99	94	105,6%	
5		Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	99,30	Sangat baik	99	94	105,6%	
6		Kompetensi Pelaksana	100,00	Sangat baik	99	94	106,4%	
7		Perilaku Pelaksana	97,93	Sangat baik	99	94	104,2%	
8		Penanganan pengaduan, saran, masukan	98,60	Sangat baik	99	94	104,9%	
9		Sarana dan Prasarana	100,00	Sangat baik	99	94	106,4%	
Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2025:					99	94	105%	

Capaian kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Petugas PTSP yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan sesuai Standar Pelayanan dan SOP melalui briefing, pelatihan standar pelayanan bagi Petugas PTSP dan pelatihan pelayanan disabilitas.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi aplikasi berbasis teknologi informasi
3. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala.
5. Pemberian reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

SASARAN III. TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%	83%	100%
	2. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	99%	99%	100%
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03	97%	97%	100%
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	100%	100%	100%
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	78%	78%	100%
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3%	3%	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100%

Tabel Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025.

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 1

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran menggunakan data dari sistem informasi aparatur, khususnya MyASN dan SIASN.

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)

4. Disiplin (5%)

Dasar hukumnya adalah berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Yang bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

DAFTAR NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN PADA PN PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Nilai IP ASN
1	Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.	Ketua	75
2	Delta Tamtama, S.H., M.H.	Wakil Ketua	75
3	Fitrizal Yanto, S.H.	Hakim	85
4	Dedy, S.H., M.H.	Hakim	85
5	Arsul Hidayat, S.H., M.H.	Hakim	85
6	Jhonson F.E. Sirait, S.H.	Hakim	85
7	Roni Susanta, S.H., M.H.	Hakim	85
8	Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Hakim	85
9	Aziz Muslim, S.H.	Hakim	85
10	Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H.	Hakim	85
11	Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.	Hakim	85
12	Asraruddin Anwar, S.H., M.H.	Hakim	85
13	Yofstian, S.H., M.H.	Hakim	85
14	Jonson Parancis, S.H., M.H.	Hakim	85
15	Dharma Setiawan, S.H., C.N.	Hakim	85
16	Refi Damayanti, S.H., M.H.	Hakim	85
17	Aslam Irfan Daulay, S.H., M.H.	Panitera	75
18	Ery Mardianto, S.T., S.H.	Sekretaris	80
19	Sapla Putra Sembiring, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	75
20	Fitri Yenti, S.H.	Panitera Muda Pidana	75
21	Prima Ardhani, S.H.	Panitera Muda Hukum	85
22	Adrian Saherwan, S.H.	Panitera Muda Tipikor	75
23	Solviati, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	75
24	Dewi Mustika Indah, S.H., S.Kom.	Kasubbag PTIP	82
25	Syaifulah, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	85
26	Yuni Elysabet, S.E., M.Si.	Kasubbag Umum dan Keuangan	85
27	Nurismawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	85
28	Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	85
29	Hj. Suryani Afan, S.H.	Panitera Pengganti	85
30	Muhammad Yunus, S.H.	Panitera Pengganti	85
31	Nova R. Sianturi, S.H.	Panitera Pengganti	85
32	Irene Wismeri, S.H.	Panitera Pengganti	85
33	Wuri Yulianti, S.T., S.H.	Panitera Pengganti	85
34	Novita Sari Ismail, S.H.	Panitera Pengganti	85
35	Nurfritria, S.H.	Panitera Pengganti	85
36	Esra Rahmawati A S., S.H.	Panitera Pengganti	75
37	Marinen Gresly S., S.H.	Panitera Pengganti	85
38	Riza Harpeni, S.H.	Panitera Pengganti	85
39	Wahyudi Putra Zainal, S.H.	Panitera Pengganti	85
40	Dita Triwulany, S.H.	Panitera Pengganti	85
41	Hendri Ruspianto, S.H.	Juru Sita	85
42	Bakri, S.H.	Juru Sita	85
43	Harry A.N., S.H., M.H.	Juru Sita	85
44	Marianty G. Simarmata, S.Sos., S.H., M.H.	Juru Sita	85
45	Lilis Triana, S.H.	Juru Sita	75
46	Anggia Putra N., A.Md., S.H.	Juru Sita	85
47	Asmailani, A.Md.	Juru Sita	85
48	Taruddin	Juru Sita Pengganti	80
49	Lusiana Febriany, S.Kom.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	85
50	Mella Iva Rifani, S.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	85
51	Febriandri Afri, S.St.	Pranata Komputer Ahli Pertama	90
52	Fadillah Rahmad, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	90
53	Juni Sabatini Hutagaol, A.Md.A.B.	Asiparis Terampil	80
54	Dodi Buana Saputra, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	85
55	Purwadi, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	85
56	M. Firanda Al Ansyari, A.Md.	Klerik - Pengolah Data dan Informasi	85
57	Arnoldus Simarmata, A.Md.	Klerik - Pengolah Data dan Informasi	85
58	Heni Hertina Manulang, A.Md.	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	75

Berdasarkan data diatas realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah diangka 83%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dinyatakan berhasil.

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 2

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

DIPA 01

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Output (25%)

Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Pers/PB/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan dipa 01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output					Nilai Aspek
1	12Desember	008	005	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	93,33 10 9,33	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,33	100,00 25 25,00	100,00	99,33	100,00%	0,00	99,33

Berdasarkan data diatas realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah diangka 99%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dinyatakan berhasil.

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 3

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN DIPA 03

Indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah:

- Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)

- Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja Tahun berjalan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03

MyIntress Tahun Anggaran: 2025 FIRANDA AL SATKER: 099214

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT					NILAI ASPEK
1	12 Desember	008	005	099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,24 15 14,21	97,37	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	94,17 25 23,54	94,17	77,75	80,00%	0,00	97,79

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan data diatas realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah diangka 97%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 97% dan dinyatakan berhasil.

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 4

PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01

Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Fungsi nilai kinerja perencanaan anggaran dipa 01 menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6.2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perencanaan Anggaran Dipa 01

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	000.01.000.000	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00	

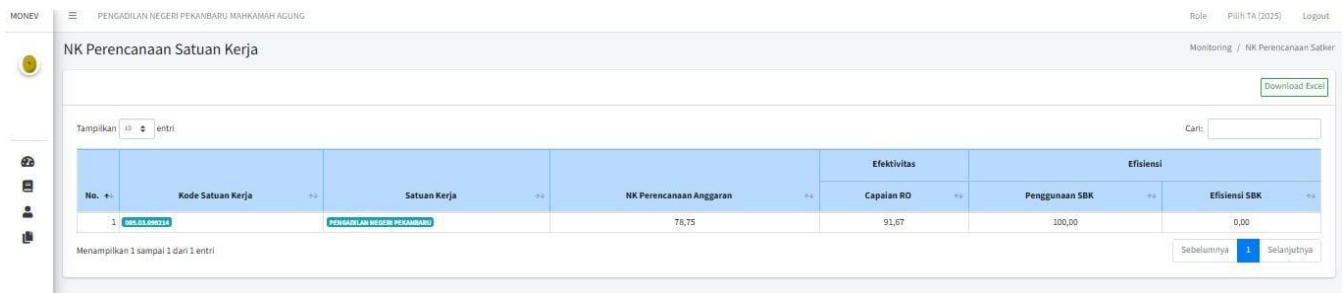
Berdasarkan data diatas realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah diangka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% dan dinyatakan berhasil.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 5

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 03

Indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03”



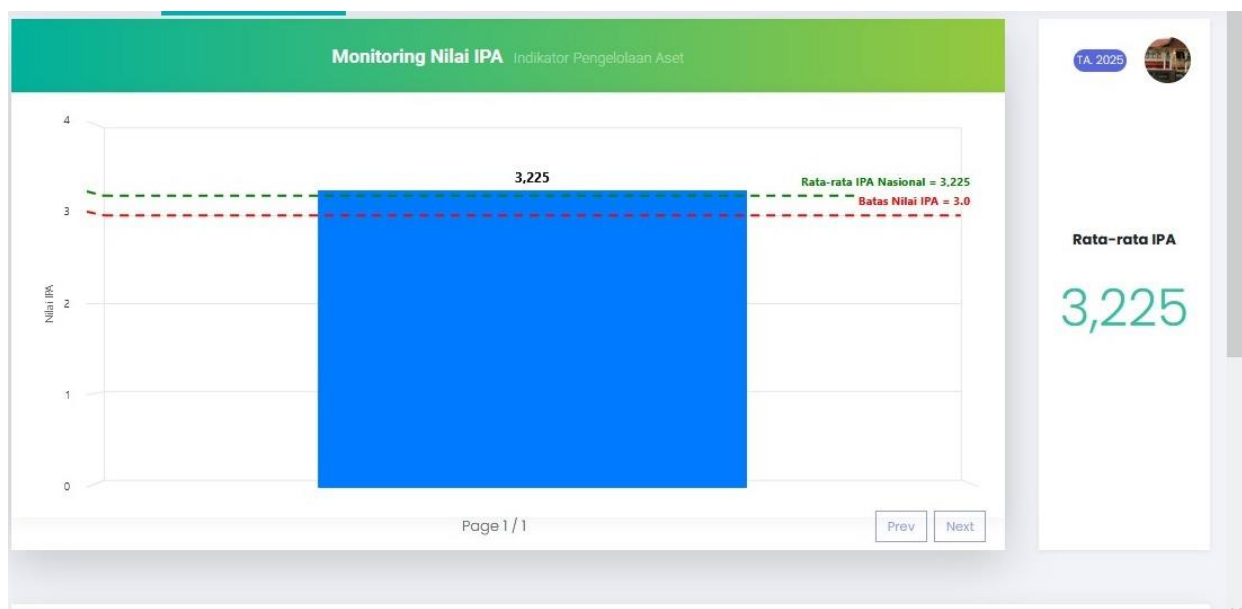
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	001.01.0002.01	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	78,75	91,67	100,00	0,00	

Berdasarkan data diatas realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah diangka 78%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 78% dan dinyatakan berhasil.

SASARAN III - INDIKATOR KINERJA 6

NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (Ipa) Satuan Kerja Pengadilan” adalah indeks yang mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menilai empat (4) sasaran strategis yaitu kepatuhan, akuntabilitas/produktivitas, administrasi, dan pengawasan/pengendalian aset.



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Dasar hukum utama kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) wajib mengacu pada UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 2020 (perubahan PP 27/2014) untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pengelolaan wajib mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga penghapusan, sesuai PMK terkait. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Penatausahaan BMN diatur dalam PMK 181/2016, mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, yang harus terdokumentasi dengan baik.

Realisasi Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru 2025 jika dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2%. Berdasarkan data tabel dibawah, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I, II, III pada tahun 2025 sebesar 103% sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I, II, III dan IV tahun 2024 sebesar 101%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

2024					2025						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	85%	93%	109%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%
	2	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	55%	57%	104%		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
	3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%
	4	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%
	5	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	22%	22%	100%		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%
	6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	92%	108%		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%
	7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	91%	106%		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	108%
	8	Persentase perkara anak yang	13%	13%	100%		8	Persentase perkara yang berhasil	3%	3%	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		diselesaikan dengan diversifikasi						diselesaikan melalui mediasi				
	9	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	99%	105%			9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%	50%	106%
								10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	100%	105%
								11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
								12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
Rata-rata Sasaran 1		104%				Rata-rata Sasaran 1		105%				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%	
	2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%							
	3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8%	8%	100%							
Rata-rata Sasaran 2		100%				Rata-rata Sasaran 2		105%				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100	
	2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	100	
							3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97	97	100	

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

							Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)			
							4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100
							5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	100
							6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
Rata-rata Sasaran 3		100%				Rata-rata Sasaran 3		100		
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekus	27%	27%	100%					
Rata-rata Sasaran 3		100%								
Rata-rata Capaian Sasaran strategis I, II, III, IV		101%				Rata-rata Capaian Sasaran strategis I, II, III		103%		

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dimana capaian kinerja telah melebihi 100%. Dimana rata-rata sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar 104% sedangkan sasaran strategis 1 pada tahun 2025 sebesar 105%. Rata-rata sasaran strategis 2 pada tahun 2024 sebesar 100% dan rata-rata sasaran strategis 2 pada tahun 2025 sebesar 105%. Dan juga rata-rata sasaran 3 pada tahun 2024 sebesar 100% sedangkan rata-rata sasaran strategis 3 pada tahun 2025 sebesar 100%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 sebesar 103% telah mendekati capaian kinerja yang diukur menggunakan target jangka menengah yaitu sebesar 100,5%. Target jangka menengah ditetapkan pada Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029. Rincian capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujud-nya peradilan yang Efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%	89%	93%	104%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%	95%	100%	105%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%	53%	56%	105%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%	72%	76%	105%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%	92%	98%	106%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%	45%	48%	106%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	108%	12%	13%	108%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	100%	3%	3%	100%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%	50%	106%	47%	50%	106%
		Persentase perkara perdata	95%	100%	105%	95%	100%	105%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		tingkat pertama yang menggunakan e-Court						
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%	94%	99%	105%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%	95%	100%	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Strategis 1			105%			105%		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%	94%	99%	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Strategis 2			105%			105%		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100	83	83	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	100	99	99	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	100	97	97	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100	95	100	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	100	78	78	100
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100	3	3	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Strategis 3			100			91,6		
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, II, dan III			103%			100,5%		

Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru jika diukur menggunakan target jangka menengah, capaiannya lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2025, hal ini disebabkan karena Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada target jangka menengah lebih rendah dibandingkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Pada tahun 2024.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja-kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut :

Analisis Efisiensi Anggaran

Uraian		belanja				Capaian kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03) BUA	518.500.000	517.888.850	99,90%	89%	93%	104%
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					95%	100%	105%
	Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan tingkat banding kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					53%	56%	105%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					72%	76%	105%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					92%	98%	106%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					45%	48%	106%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative					12%	13%	108%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi					3%	3%	100%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui					47%	50%	106%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	diversi							
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court					95%	100%	105%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)					94%	99%	105%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)					95%	100%	105%
Rata-rata					99,90%			105%
EFISIEN								
Karena realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,90% < 105%)								
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan					94%	99%	105%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan					83	83	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	DIPA (01) Badilum	18.082.424.000	17.957.970.769	99,31%	99	99	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)					97	97	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)					100	100	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)					78	78	100
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan					3	3	100
Rata-rata								99,31%
EFISIEN								
Karena realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,31% < 102,5%)								

Berdasarkan data pada tabel diatas, realisasi belanja yang mendukung kinerja untuk mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis lebih kecil dari capaian kinerja sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern", dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 105%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini didukung dengan dengan belanja anggaran DIPA (03) BUA dengan realisasi belanja sebesar 99,90%. Nilai

realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 1 telah Efisien.

2. Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik" dengan 1 (satu) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 105% dan juga sasaran strategis 3 "Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional" dengan 6 (enam) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Capaian-capaian kinerja ini didukung dengan belanja anggaran DIPA (01) Badilum. Rata-rata realisasi belanja Biaya Proses dan DIPA (01) Badilum sebesar 99,31%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja sasaran strategis 2 dan sasaran strategis 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 2 telah Efisien.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) dapat diartikan sebagai cara organisasi membangun kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efektif.

Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Uraian		Sumber Daya Manusia			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Standar Jumlah Layanan	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	130	95	73%	89%	93%	104%
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				95%	100%	105%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				53%	56%	105%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				72%	76%	105%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				92%	98%	106%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				45%	48%	106%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative				12%	13%	108%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi				3%	3%	100%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi				47%	50%	106%
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court				95%	100%	105%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)				94%	99%	105%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)				95%	100%	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja		73%			105%		
EFISIEN							
Karena Ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	130	95	73%	94%	99%	105%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Rata-Rata Capaian Kinerja		73%			105%		
EFISIEN							
Karena Ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	130	95	73%	83	83	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)				99	99	100
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)				97	97	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)				100	100	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)				78	78	100
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3	3	100
Rata-Rata Capaian Kinerja		73%			102,5%		
EFISIEN							
Karena Ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Pengadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tersedia untuk mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025 hanya sebesar 73% dari standard jumlah maksimum pegawai, namun dengan jumlah sumber daya manusia yang ada Pengadilan Negeri Pekanbaru berhasil memperoleh capaian kinerja sasaran strategis masing- masing sebesar 105%, 105% dan 100%.

Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Walaupun jumlah sumber daya yang belum maksimal dan memenuhi standar, namun Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membangun kinerja dan menggunakan sumber daya secara efektif sehingga mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN

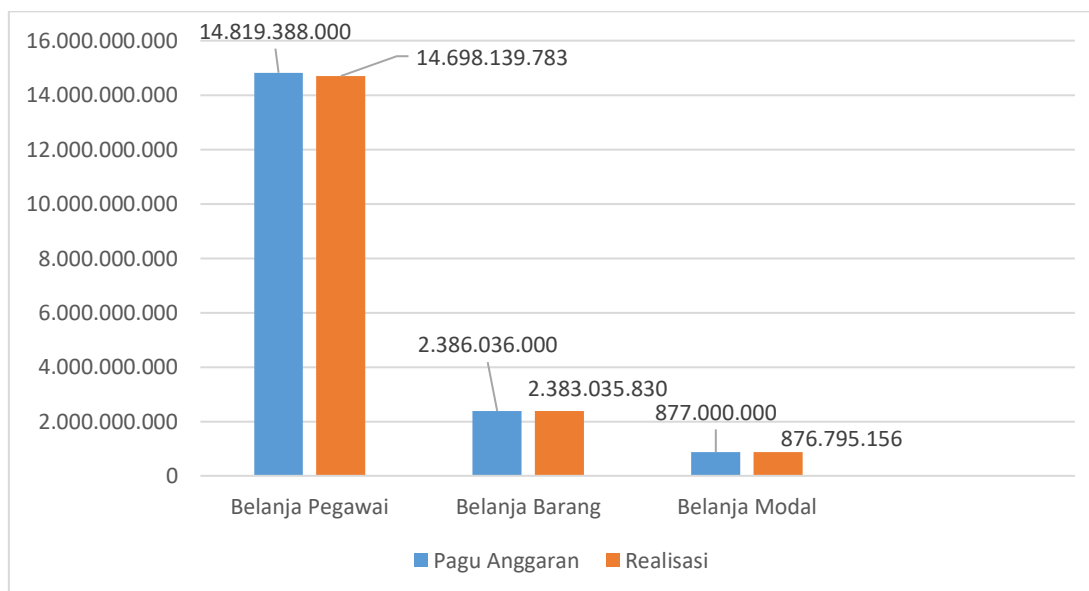
Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan pagu anggaran DIPA pada tahun 2025 sebesar Rp. 18.082.424.000 (delapan belas miliar delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi: Rp. 18.082.424.000,- meliputi belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai = Rp. 14.819.388.000,-
 - b. Belanja Barang = Rp. 2.386.036.000,-
 - c. Belanja Modal = Rp. 877.000.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

NO	DIPA 01	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI (51)	14.819.388.000	14.698.139.783	99,18%	121.248.217	0,82%
2	BELANJA BARANG (52)	2.386.036.000	2.383.035.830	99,87%	3.000.170	0,13%
3	BELANJA MODAL	877.000.000	876.795.156	99,98%	204.453.231	0,02%
	JUMLAH	18.082.424.000	17.957.970.769	99,31%	124.453.231	0,69%

Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

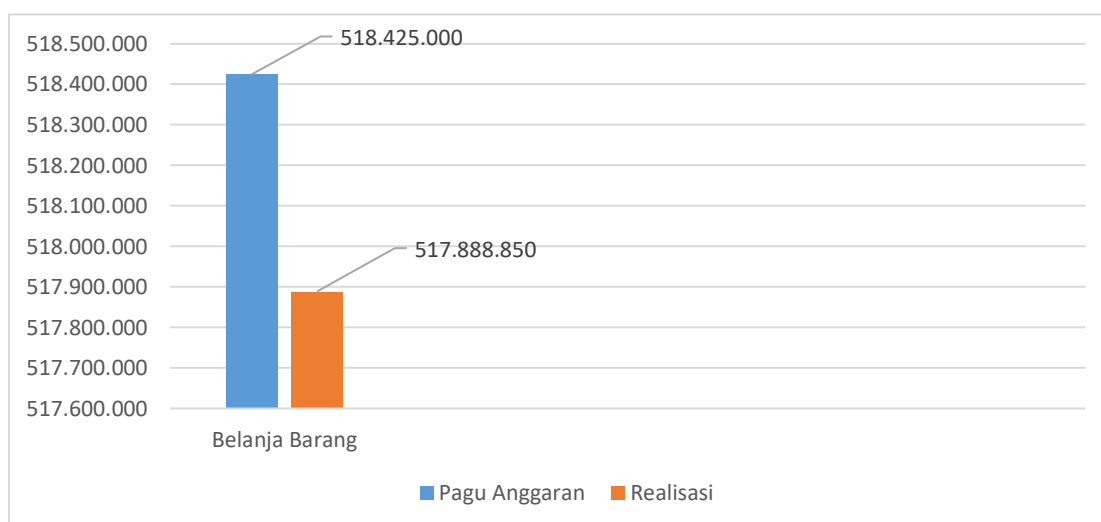
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum : Rp. 548.190.000,-

Meliputi belanja barang untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03

NO	DIPA 03	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	518.425.000	517.888.850	99,90%	536.150	0,10%

Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03



DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pekanbaru digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Indikator Kegiatan: Layanan sarana dan prasarana, layanan dukungan manajemen internal, dan layanan manajemen kinerja internal

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 18.082.424.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO	DIPA 01	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI (51)	14.819.388.000	14.698.139.783	99,18%
2	BELANJA BARANG (52)	2.386.036.000	2.383.035.830	99,87%
3	BELANJA MODAL	877.000.000	876.795.156	99,98%
	JUMLAH	18.082.424.000	17.957.970.769	99,31%

1.2. Kegiatan

Belanja Barang pada DIPA 01 akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mendukung tercapainya salah satu Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 99.000.000 dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.000.000	99.000.000	100%

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan: Koordinasi, perkara hukum perorangan dan layanan bantuan hukum perorangan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 518.425.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO	DIPA 03	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1	BELANJA BARANG	518.425.000	517.888.850	99,90%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan Perdata menggunakan biaya Proses dari bagian kepaniteraan Perdata.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata yang dibiayai oleh Para Pihak pada tahun 2025:

BIAYA PROSES TAHUN 2025

NO	PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN				
			SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR	KAS DI BRANGKAS
1	Januari	Biaya Perkara	Rp20.706.330,00	Rp3.650.000,00	Rp2.580.000,00	Rp21.776.330,00	Rp21.776.330,00
2	Februari	Biaya Perkara	Rp21.776.330,00	Rp4.150.000,00	Rp1.485.000,00	Rp24.441.330,00	Rp24.441.330,00
3	Maret	Biaya Perkara	Rp24.441.330,00	Rp3.700.000,00	Rp2.110.000,00	Rp26.031.330,00	Rp26.031.330,00
4	April	Biaya Perkara	Rp26.031.330,00	Rp3.950.000,00	Rp2.485.000,00	Rp27.496.330,00	Rp27.496.330,00
5	Mei	Biaya Perkara	Rp27.496.330,00	Rp3.850.000,00	Rp8.680.000,00	Rp22.666.330,00	Rp22.666.330,00
6	Juni	Biaya Perkara	Rp22.666.330,00	Rp3.400.000,00	Rp2.880.000,00	Rp23.186.330,00	Rp23.186.330,00
7	Juli	Biaya Perkara	Rp23.186.330,00	Rp4.700.000,00	Rp4.210.000,00	Rp23.676.330,00	Rp23.676.330,00
8	Agustus	Biaya Perkara	Rp23.676.330,00	Rp4.950.000,00	Rp8.440.000,00	Rp20.186.330,00	Rp20.186.330,00
9	September	Biaya Perkara	Rp20.186.330,00	Rp4.750.000,00	Rp5.075.000,00	Rp19.861.330,00	Rp19.861.330,00
10	Oktober	Biaya Perkara	Rp19.861.330,00	Rp7.100.000,00	Rp5.765.000,00	Rp21.196.330,00	Rp21.196.330,00
11	November	Biaya Perkara	Rp21.196.330,00	Rp5.050.000,00	Rp3.215.000,00	Rp23.031.330,00	Rp23.031.330,00
12	Desember	Biaya Perkara	Rp23.031.330,00	Rp5.800.000,00	Rp15.185.000,00	Rp13.646.330,00	Rp13.646.330,00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2025 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025-2029.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 103%. Dari 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 100%.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu: anggaran, kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana dan teknologi informasi sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 18.082.424.000,- (Delapan Belas Miliar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 99%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 518.425.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,90%.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mengalami kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah direncanakan yang pada umumnya disebabkan adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mencapai target yang telah direncanakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara, baik perkara yang melalui jalur diversifikasi maupun mediasi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Para pihak belum mau menggunakan mediasi dan diversifikasi sebagai salah satu penyelesaian perkara.

2. Penyelesaian perkara perdata masih ada diatas 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara PHI masih ada diatas (50 hari kerja) pada tahun 2024, dikarenakan:

- Kehadiran para pihak terutama yang berada di luar wilayah Hukum Pekanbaru
- Panggilan para pihak yg dipanggil dengan panggilan umum (tidak diketahui alamatnya).
- Ketidaktertiban para pihak pada saat kesepakatan court calender.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam kinerja serta kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Pekanbaru bertekad untuk dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kinerja dan kualitas ini tidak terlepas dari andil dan peran semua pihak yang bersifat konstruktif kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari instansi/lembaga lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.

Pengadilan Negeri Pekanbaru mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru di masa yang akan datang.

B. SARAN

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal

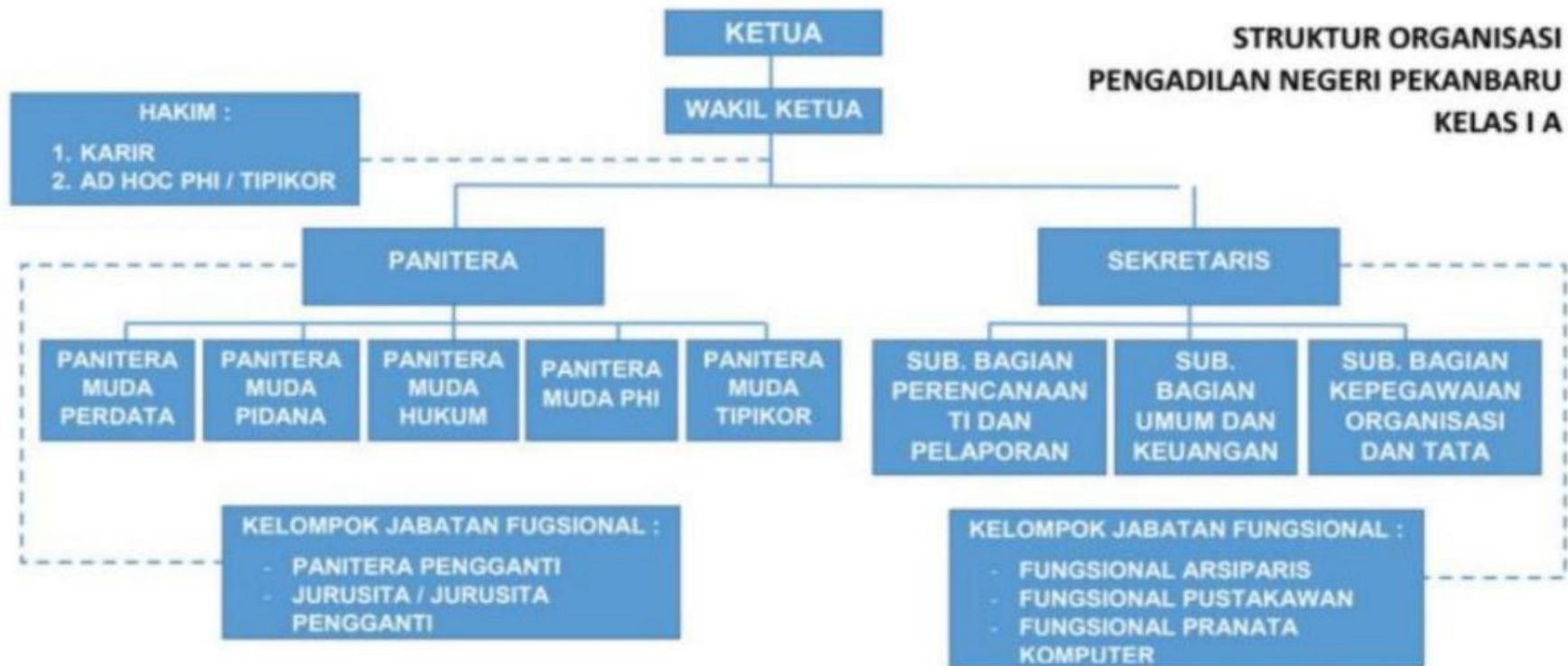
LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020-2024**
- 4. LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2024**
- 5. LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 6. LAMPIRAN 6 : CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 7. LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA BERKALA**
- 8. LAMPIRAN 8 : CHECKLIST REVIU**
- 9. LAMPIRAN 9 : SK PENYUSUN LKjIP**
- 10. LAMPIRAN 10 : ANALISIS EFISIENSI**

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

(Perma No.7 Tahun 2015)



LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan. Peraturan perundang- undangan atau Kebijakan terkait yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
2.		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama kinerja dihitung sejak putusan di ucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional di kurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan di ucapkan sampai dengan salinan putusan di sampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan atau	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		<p>Amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK Secara tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga di hitung sejak pemberitahuan isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di sampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara Pidana, secara konvensional/elektronik/surat Tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita di hitung sejak petikan Isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di terima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik di hitung sejak petikan isi putusan di terima Pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga di hitung sejak petikan isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di sampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi 		
--	--	---	--	--	--

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak yang termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana (di kurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan putusan Perkara pidana Tingkat banding, Kasasi dan PK Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			<p>Dasar hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>		
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1.Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			<p>salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		
		1.8 persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui mediasi	<p>Catatan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan, dan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dihasilkan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 		
2.		1.9 Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		<p>1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-berpadu. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional		
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang Di ajukan Secara Elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang di ajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing masing layanan yang di ajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang di ajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		yang di tetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layana pos bantuan hokum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar Gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara(prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkar perempuan berhadapan dengan hokum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hokum; <p>Layanan di SK KMA 026 tahun 2012 diantaranya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan adminitrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hokum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025




3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM(menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indicator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6 2024 tentang kinerja pengelolaan barang milik negara tahun 2024 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa SIMAN MonSAKTI dan laporan Realisasi Anggaran

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah 		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester Triwulan Dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan Pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

KAMUS IKU PENGADILAN NEGERI PEKANBARU




IKU 1

Nama IKU	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu B: Jumlah perkara perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 2

Nama IKU	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu B: Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Data	
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 3

Nama IKU	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu B: Jumlah perkara pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 4

Nama IKU	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	A: Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu B: Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 5

Nama IKU	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
Definisi	Mengukur jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Mengacu pada SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif B: Perkara yang diajukan untuk restoratif
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Treshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 6

Nama IKU	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
----------	--

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Definisi	Mengukur persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B)*100\%$
	A: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding B: Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 7

Nama IKU	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Definisi	Mengukur persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B)*100\%$
	A: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi B: Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
-------------	---




IKU 8

Nama IKU	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Definisi	Mengukur persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana anak. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil B: Jumlah perkara diversi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

IKU 9

Nama IKU	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan Masyarakat dari aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Mahkamah Agung
Periode Pengambilan Data	Triwulanan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi	Positif (semakin tinggi semakin baik)




Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Pemantauan dan Pelaporan	
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-80%  80% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu 5. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 8. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 9. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 10. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 11. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 12. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 13. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 14. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) 15. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)




IKU 10

Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ <p>A: Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>B: Jumlah putusan</p>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 11

Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu B: Jumlah putusan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 12

Nama IKU	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Definisi	Mengukur persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil B: Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan


IKU 13

Nama IKU	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Definisi	Mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dimana definisi prodeo adalah pembebasan biaya perkara
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan B: Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan




IKU 14

Nama IKU	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
Definisi	Mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	di Pengadilan, dimana definisi Golongan Tertentu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) B: Jumlah permohonan layanan hukum
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi Tuanku Online
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

IKU 15

Nama IKU	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Definisi	Mengukur persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non exxutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan B: Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan, aplikasi Evakip, aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, triwulanan, dan tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kerja	 < 50%  50%-70%  70% - 100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekabaru Tahun 2025

Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Sumber Data (Dasar Hukum)	

1. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pentapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akintabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya



Pekabaru, 14 Januari 2026

Penanggung Jawab,

Bambang Trigoro

LAMPIRAN 3:
MATRIK RENSTRA 2020-2024

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	90%	90%	91%	92%	1. Program Dukungan Manajemen	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2. Layanan Dukungan Manajemen Internal 3. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1. 10 unit	18.751.453.000
		95%		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%				2. 2 Layanan	17.523.834.000
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	53%		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para	53%	55%	55%	55%	55%				4. 1 Dokumen	300.000
	Persentase Putusan Perkara Perdata													1. 2 Kegiatan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	72%	pihak	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	73%	73%	73%	74%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Manajemen Peradilan Umum	2. Perkara Hukum Perseorangan 3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 4. Perkara Hukum Perseorangan	2. 1.370 Perkara 3. 169 Orang 4. 3 Perkara	477.920.000 44.000.000 450.000
	92%		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	93%	93%	93%	94%					
	45%		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	46%	46%	47%	48%					
	12%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	13%	14%	15%					
	3%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	4%	4%					
	47%		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	48%	48%	49%	50%					
	95%		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang	95%	95%	96%	96%	96%					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

				menggunakan e- Court										
		94%		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	94%	95%	96%	96%					
		95%		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	96%	96%	97%	97%					
		94%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	94%					
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	83	83					
		99		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	99	99	99					
		97		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	98	98	99					

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		95		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	95	95	95					
		78		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
		3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

LAMPIRAN 4:

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	3. Program Dukungan Manajemen	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. 10 unit	18.751.453.000	
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%			2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. 2 Layanan	17.523.834.000	
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%			2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3. Layanan Manajemen Kinerja Internal	4. 1 Dokumen	300.000
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%			1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	2. Perkara Hukum Perseorangan	477.920.000			3. Layanan Bantuan Hukum	44.000.000

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83					
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99					
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97					
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100					
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78					
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3					

LAMPIRAN 5:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	47%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	94%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

	Kepercayaan Publik		yang ditetapkan	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	104%
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	56%	105%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	76%	105%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	98%	106%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	48%	106%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	108%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	100%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	50%	106%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	100%	105%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94%	99%	105%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	100
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	100
		3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100
			Nilai Kinerja Perencanaan	78	78	100

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

			Anggaran DIPA (03)			
		4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100

**LAMPIRAN 7:
PENGUKURAN KINERJA PER
TRIWULAN
TAHUN 2024**

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				REALISASI				CAPAIAN %			
			TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	89%	89%	89%	93%	93%	93%	93%	104%	104%	104%	104%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	105%	105%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	53%	53%	53%	56%	56%	56%	56%	105%	105%	105%	105%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	72%	72%	72%	76%	76%	76%	76%	105%	105%	105%	105%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	92%	92%	92%	98%	98%	98%	98%	106%	106%	106%	106%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	45%	45%	45%	48%	48%	48%	48%	106%	106%	106%	106%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	13%	108%	108%	108%	108%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	100%	100%	100%	100%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	47%	47%	47%	50%	50%	50%	50%	106%	106%	106%	106%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	105%	105%

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	94%	94%	94%	99%	99%	99%	99%	105%	105%	105%	105%
		l. diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	105%	105%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	99%	99%	99%	99%	105%	105%	105%	105%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%	100%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	100%	100%	100%	100%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	100%	100%	100%	100%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN 8: CHECKLIST REVIU

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKJIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025

		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		11. IKU dan IK telah SMART.	√

Pereviu I



UDUT WIDODO K. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Pereviu II



REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

LAMPIRAN 9 :
SK PENYUSUNAN LKjIP



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Nomor : 07/KPN.W4-U1/SK.HK1.2.5/I/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU;**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU,

BAMBANG TRIKORO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR : 07/KPN.W4-U1/SK.HK1.2.5/I/2026

TANGGAL 14 JANUARI 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum
2.	Koordinator Validasi Data	ASLAM IRFAN DAULAY, S.H., M.H ERRY MARDIANTO, S.T., S.H
3.	Ketua	DELTA TAMTAMA, S.H., M.H
4.	Sekretariat	DEWI MUSTIKA INDAH, S.H., S.Kom
5.	Anggota	1. ERY MARDIANTO, S.T., S.H 2. SOLVIATI, S.H., M.H 3. FITRI YENTI, S.H 4. SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H., M.H 5. ADRIAN SAHERWAN, S.H 6. PRIMA ARDHANI, S.H 7. YUNI ELYSABET, S.E 8. SYAIFULLAH, S.E 9. TIURMA VALENTINA BATUBARA, A.Md
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H 2. REFI DAMAYANTI, S.H., M.H



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU,

BAMBANG TRIKORO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR : 07/KPN.W4-U1/SK.HK1.2.5/I/2026

TANGGAL 14 JANUARI 2026

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja;
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
4.	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I;
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU,



BAMBANG TRIKORO